



# Komunikasi antar budaya dalam krisis global: Respon pemerintah Jepang dan Amerika Serikat terhadap pandemi COVID-19

Angela Del Carmen 

Elsa Hana Almonika

Universitas Kristen Indonesia

## Email

[del\\_carmen@syriacorthodoxchurch.id](mailto:del_carmen@syriacorthodoxchurch.id)

[elsa@syriacorthodoxchurch.id](mailto:elsa@syriacorthodoxchurch.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji komunikasi antar budaya dalam merespons krisis global, dengan fokus pada respons pemerintah Jepang dan Amerika Serikat terhadap pandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus komparatif, penelitian ini menganalisis perbedaan dalam strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh kedua negara. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis media untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pesan kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kolektivistik Jepang lebih mendukung kepatuhan sosial, sementara budaya individualistik Amerika Serikat cenderung mengedepankan kebebasan pribadi, yang berpengaruh pada respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Pendekatan komunikasi yang berbasis budaya ini memperkuat diplomasi kesehatan global, dengan Jepang berhasil memperkuat reputasinya, sementara Amerika Serikat memanfaatkan diplomasi vaksin untuk memulihkan citranya di panggung internasional.

**Kata kunci:** Budaya Individualistik, Budaya Kolektivistik, Diplomasi Kesehatan, Komunikasi Krisis, Pandemi COVID-19

## ABSTRACT

*This study examines cross-cultural communication in responding to global crises, focusing on the responses of the Japanese and U.S. governments to the COVID-19 pandemic. Using a descriptive qualitative approach and a comparative case study design, this research analyzes the differences in crisis communication strategies implemented by both countries. Data were collected through document studies and media analysis to identify key themes in the health messages conveyed by governments and the media. The results show that Japan's collectivistic culture supports social compliance, while the individualistic culture of the U.S. emphasizes personal freedom, affecting the public's response to health policies. This culture-based communication approach strengthens global health diplomacy, with Japan enhancing its reputation, while the U.S. leveraged vaccine diplomacy to restore its image on the international stage.*

**Keywords:** *Collectivist Culture, COVID-19 Pandemic, Crisis Communication, Health Diplomacy, Individualistic Culture.*



## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan krisis global yang menuntut tanggapan cepat dari pemerintah di seluruh dunia. Respons yang cepat dan efektif sangat diperlukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, baik dalam segi kesehatan maupun sosial-ekonomi. Selama pandemi, komunikasi publik menjadi elemen penting dalam merespons krisis ini (Aung et al., 2023). Komunikasi yang cepat dan jelas membantu meminimalkan ketidakpastian di tengah-tengah ancaman global yang tidak pasti dan berisiko tinggi, seperti yang dialami oleh berbagai negara (Montanari et al., 2020). Pemerintah yang mampu menyampaikan informasi secara tepat waktu dan transparan memiliki peluang yang lebih besar dalam mengelola persepsi publik, serta mencegah kepanikan dan kebingungan yang dapat memperburuk krisis (Dryhurst et al., 2020). Menurut penelitian oleh Glik, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mitigasi dampak negatif, termasuk masalah kesehatan mental akibat ketidakpastian dan ketakutan yang menyertai krisis tersebut (Glik, 2007). Oleh karena itu, strategi komunikasi yang adaptif dan tepat menjadi bagian penting dalam menanggapi pandemi seperti COVID-19.

Kepercayaan publik memainkan peran besar dalam efektivitas komunikasi selama krisis. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan transparan dari pemerintah sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat (Dryhurst et al., 2020). Ketika masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, mereka lebih cenderung mematuhi pedoman kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah (Arrábida, 2023). Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif berfungsi untuk menjaga ketenangan di masyarakat dan mencegah terjadinya kepanikan yang dapat memperburuk kondisi selama pandemi (Aung et al., 2023). Selain itu, komunikasi yang cepat juga memungkinkan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan tanpa menunda, sehingga memperkuat dampak kebijakan kesehatan yang diterapkan (Glik, 2007). Dalam konteks ini, keterbukaan dan konsistensi pesan yang disampaikan oleh pemerintah sangat menentukan sejauh mana masyarakat mengikuti protokol kesehatan dan menjaga keselamatan diri serta orang lain (Dryhurst et al., 2020).

Berbagai negara telah mengembangkan strategi komunikasi krisis yang berbeda untuk merespons pandemi COVID-19. Beberapa negara mengadopsi strategi berbasis keterlibatan masyarakat untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Gilmore et al., 2020). Sementara itu, negara lain lebih fokus pada penyebaran informasi yang langsung dan eksplisit, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian yang ada di masyarakat (Aung et al., 2023). Penelitian tentang komunikasi krisis selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa komunikasi risiko yang efektif dapat membantu mitigasi risiko dan mendukung pelaksanaan tindakan perlindungan yang lebih baik (Glik, 2007). Namun, meskipun ada banyak upaya yang dilakukan, tantangan utama tetap ada pada ketidakkonsistenan dan ketidakpastian yang terus hadir selama krisis ini, yang memengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan kepada publik (Schiavo et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang perbedaan strategi komunikasi dan efektivitasnya di berbagai negara sangat diperlukan untuk memahami bagaimana komunikasi krisis dapat membantu mengurangi dampak pandemi di masa depan.

Faktor budaya memainkan peran yang sangat penting dalam bagaimana komunikasi publik diterima oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dari budaya kolektivistik lebih cenderung menerima pesan yang disampaikan oleh pemerintah karena mereka lebih mengutamakan kepatuhan terhadap otoritas dan keselarasan sosial (Kim & Markus, 1999). Sebaliknya, dalam budaya individualistik, orang lebih cenderung menilai pesan dari pemerintah berdasarkan kebebasan pribadi dan otonomi mereka (Hedden et al., 2008). Dalam konteks pandemi COVID-19, budaya kolektivistik sering kali mempermudah adopsi kebijakan kesehatan

karena masyarakat cenderung mematuhi protokol kesehatan tanpa banyak perlawanan (Procel et al., 2023). Sementara itu, budaya individualistik dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan pribadi, seperti pembatasan sosial dan kewajiban menggunakan masker (Schiavo et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan pesan kesehatan mereka dengan nilai-nilai budaya lokal agar pesan tersebut dapat lebih diterima oleh masyarakat dan mengurangi perlawanan terhadap kebijakan yang diterapkan (Aung et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa budaya kolektivistik seperti di Jepang, cenderung mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan kesehatan publik. Dalam budaya seperti ini, kepatuhan terhadap norma sosial dan kebijakan pemerintah menjadi hal yang lebih dihargai (Hedden et al., 2008). Hal ini terbukti selama pandemi COVID-19, di mana masyarakat Jepang lebih cenderung mematuhi instruksi untuk menggunakan masker dan menjaga jarak sosial dibandingkan dengan masyarakat di negara dengan budaya individualistik seperti Amerika Serikat (Kim & Markus, 1999). Negara-negara dengan budaya kolektivistik juga cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah, yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan (Aung et al., 2023). Sementara itu, di negara-negara dengan budaya individualistik, seperti AS, perlawanan terhadap kebijakan pemerintah lebih tinggi, terutama jika kebijakan tersebut dianggap membatasi kebebasan pribadi (Schiavo et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dapat sangat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan selama pandemi (Gilmore et al., 2020).

Meskipun banyak penelitian membahas komunikasi krisis dalam konteks pandemi COVID-19, sedikit yang membahas bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi strategi komunikasi di dua negara dengan budaya yang sangat berbeda. Penelitian yang ada cenderung fokus pada komunikasi krisis secara umum, tanpa mempertimbangkan dimensi budaya yang dapat memengaruhi cara masyarakat menerima dan merespons pesan kesehatan. Sebagai contoh, meskipun komunikasi risiko kesehatan penting, belum ada cukup studi yang membandingkan respons komunikasi antara negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda, seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang memiliki pendekatan komunikasi yang sangat kontras (Hu & Qiu, 2020).

Sementara beberapa studi mengakui pentingnya komunikasi risiko yang jelas dan cepat, belum banyak penelitian yang mendalami bagaimana budaya kolektivistik dan individualistik dapat memengaruhi penerimaan pesan tersebut. Misalnya, masyarakat Jepang yang lebih kolektivistik lebih cenderung mengikuti instruksi pemerintah karena nilai harmoni sosial dan kepentingan bersama, sementara di Amerika Serikat yang lebih individualistik, kebebasan pribadi sering kali mengarah pada penolakan terhadap kebijakan pemerintah, seperti penggunaan masker dan pembatasan sosial (Glik, 2007).

Selain itu, meskipun banyak studi tentang komunikasi krisis selama pandemi, sedikit yang menyoroti bagaimana perbedaan dalam norma budaya memengaruhi cara masyarakat memahami dan mematuhi protokol kesehatan. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa budaya kolektivistik lebih mendukung pengambilan keputusan bersama dan partisipasi sukarela, sedangkan budaya individualistik cenderung menekankan kebebasan individu dan pengambilan keputusan secara personal. Hal ini berdampak pada kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan masyarakat yang dapat bervariasi antara negara dengan latar belakang budaya yang berbeda (Dryhurst et al., 2020).

Selain itu, meskipun telah ada studi mengenai penggunaan media sosial dalam diseminasi informasi selama krisis, belum ada cukup penelitian yang mengkaji bagaimana budaya dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan media sosial dalam komunikasi krisis. Misinformasi dan inkonsistensi dalam informasi yang beredar di media sosial dapat berpengaruh besar terhadap respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, namun

penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang peran media sosial dalam menyebarkan pesan kesehatan yang relevan dan efektif di berbagai budaya (Schiavo et al., 2021).

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa penelitian yang membahas komunikasi krisis secara umum, penelitian yang secara spesifik membahas perbedaan budaya dalam konteks strategi komunikasi krisis masih terbatas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana budaya memengaruhi penerimaan dan efektivitas pesan kesehatan dalam krisis global, serta bagaimana strategi komunikasi ini berdampak pada hubungan internasional dan diplomasi kesehatan global.

Penelitian yang membandingkan respons komunikasi krisis antara negara-negara dengan budaya yang kontras, seperti Jepang dan Amerika Serikat, masih terbatas, terutama dalam konteks diplomasi kesehatan internasional. Meskipun banyak penelitian yang membahas komunikasi krisis selama pandemi COVID-19, sedikit yang mengkaji bagaimana perbedaan budaya di antara negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda dapat mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi dalam merespons krisis global. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada studi kasus dalam konteks nasional, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek perbandingan antarnegara (Hu & Qiu, 2020). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana negara-negara dengan budaya yang berbeda, seperti Jepang yang kolektivistis dan Amerika Serikat yang lebih individualistis, menggunakan pendekatan komunikasi krisis yang berbeda.

Selain itu, tidak banyak studi yang mengeksplorasi hubungan antara budaya dan efektivitas pesan komunikasi dalam krisis kesehatan global. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada komunikasi risiko yang bersifat umum, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana konteks budaya dapat mempengaruhi cara pesan tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh, di negara-negara dengan budaya kolektivistik seperti Jepang, komunikasi sering kali bersifat implisit dan menghargai harmoni sosial, sementara di negara-negara dengan budaya individualistik seperti Amerika Serikat, komunikasi lebih eksplisit dan menekankan kebebasan pribadi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan ini mempengaruhi penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan (Dryhurst et al., 2020).

Selanjutnya, meskipun ada penelitian yang membahas hubungan antara budaya dan komunikasi risiko, sedikit yang membandingkan dampak langsung perbedaan budaya pada diplomasi kesehatan internasional. Diplomasi kesehatan menjadi alat penting dalam membangun kerja sama global selama krisis, namun masih terbatas pemahaman tentang bagaimana negara dengan budaya yang sangat berbeda dapat memengaruhi hubungan internasional mereka melalui strategi komunikasi mereka. Penelitian ini dapat membantu menjelaskan bagaimana Jepang dan Amerika Serikat menggunakan diplomasi kesehatan mereka untuk membangun reputasi internasional dan memperkuat hubungan antarnegara, terutama dalam bidang kesehatan global (Gilmore et al., 2020).

Selain itu, terdapat sedikit penelitian yang memfokuskan pada bagaimana budaya kolektivistik dan individualistik mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang disampaikan dalam konteks komunikasi krisis. Penelitian yang ada umumnya lebih banyak membahas bagaimana kebijakan ini diterima dalam satu budaya tertentu tanpa membandingkannya dengan budaya lainnya. Padahal, dalam budaya kolektivistik seperti Jepang, kepatuhan terhadap kebijakan sering kali lebih tinggi karena adanya norma sosial yang kuat dan kepercayaan pada otoritas, sementara dalam budaya individualistik seperti Amerika Serikat, kebebasan individu dan ketidaksepakatan terhadap kebijakan pemerintah sering kali menghambat penerimaan kebijakan tersebut (Hedden et al., 2008; Kim & Markus, 1999).

Terakhir, penting untuk menyoroiti keterbatasan penelitian yang membahas perbedaan dalam strategi komunikasi krisis antarnegara yang berbudaya berbeda, terutama dalam konteks diplomasi kesehatan internasional. Strategi komunikasi yang berhasil di satu negara belum tentu efektif di negara lain, terutama jika faktor budaya yang memengaruhi persepsi risiko dan respons terhadap pesan tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali bagaimana budaya memengaruhi cara negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat mengelola komunikasi krisis mereka, serta dampaknya terhadap hubungan internasional mereka di bidang diplomasi kesehatan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Belum banyak yang diketahui tentang bagaimana perbedaan dalam pendekatan komunikasi mempengaruhi efektivitas pesan kesehatan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Meskipun penelitian telah banyak dilakukan mengenai komunikasi krisis dalam konteks pandemi COVID-19, sebagian besar berfokus pada efektivitas pesan secara umum tanpa memperhitungkan perbedaan pendekatan yang digunakan oleh negara-negara dengan budaya yang berbeda. Sebagai contoh, Jepang, dengan budaya kolektivistiknya, lebih mengutamakan harmoni sosial dan kepatuhan terhadap norma sosial, sementara Amerika Serikat, dengan budaya individualistiknya, lebih menghargai kebebasan pribadi dan pilihan individu dalam merespons instruksi pemerintah (Hedden et al., 2008). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan ini mempengaruhi efektivitas komunikasi krisis dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan (Kim & Markus, 1999).

Selain itu, terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji dampak dari pendekatan komunikasi berbasis budaya terhadap persepsi risiko yang dibawa oleh pesan kesehatan. Pada masyarakat dengan budaya kolektivistik, pesan yang lebih implisit dan mengedepankan tanggung jawab sosial sering kali lebih diterima dan dipatuhi (Dryhurst et al., 2020). Sebaliknya, dalam budaya individualistik, pesan yang lebih eksplisit dan menghargai kebebasan pribadi mungkin lebih efektif. Namun, sedikit yang diketahui tentang bagaimana masing-masing pendekatan ini memengaruhi cara masyarakat mempersepsikan risiko kesehatan dan apakah hal ini berhubungan dengan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Glik, 2007).

Penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam komunikasi risiko dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan, terutama jika pesan yang disampaikan tidak konsisten atau mudah diperdebatkan. Hal ini lebih sering terjadi di negara-negara dengan budaya yang lebih individualistik, seperti Amerika Serikat, di mana kepercayaan terhadap pemerintah lebih rendah dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan kesehatan dapat muncul (Hedden et al., 2008). Sebaliknya, negara dengan budaya kolektivistik seperti Jepang cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, meskipun pesan yang diberikan tidak terlalu eksplisit atau tegas (Dryhurst et al., 2020). Perbedaan dalam pola komunikasi ini menunjukkan bahwa faktor budaya dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk respons masyarakat terhadap pesan kesehatan.

Lebih jauh lagi, perbedaan dalam pendekatan komunikasi ini juga perlu dipertimbangkan dalam konteks penggunaan media sosial selama pandemi. Di Amerika Serikat, media sosial berperan besar dalam diseminasi informasi, namun juga menjadi sarana penyebaran misinformasi yang dapat memperburuk ketidakpastian dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah (Schiavo et al., 2021). Sebaliknya, di Jepang, meskipun media sosial juga digunakan, kontrol sosial yang lebih ketat dan budaya komunikasi yang lebih harmonis membantu membatasi penyebaran disinformasi (Cool et al., 2015). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan ini mempengaruhi efektivitas komunikasi risiko dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam masing-masing negara.

Secara keseluruhan, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana perbedaan dalam pendekatan komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas pesan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, terutama dalam konteks pandemi global yang melibatkan negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda. Pemahaman ini penting untuk merancang strategi komunikasi yang lebih responsif terhadap budaya lokal dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan dalam krisis kesehatan global (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Selama pandemi COVID-19, meskipun strategi komunikasi yang digunakan oleh berbagai negara memiliki pengaruh besar terhadap respons domestik terhadap krisis, hubungan antara strategi komunikasi tersebut dan dampaknya terhadap reputasi global serta pengaruh diplomasi kesehatan internasional masih belum banyak dijelajahi. Beberapa penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada komunikasi internal negara-negara tertentu tanpa menelaah bagaimana komunikasi tersebut dapat mempengaruhi posisi dan reputasi negara tersebut di kancah internasional (Feldbaum & Michaud, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa studi lebih lanjut tentang hubungan antara strategi komunikasi krisis dan diplomasi kesehatan internasional sangat dibutuhkan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan komunikasi yang berbeda dapat memengaruhi pengaruh global negara selama krisis kesehatan.

Tantangan ini muncul karena komunikasi krisis yang efektif sering kali dipengaruhi oleh konteks domestik, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial, dan perbedaan budaya. Di negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, strategi komunikasi yang lebih mengutamakan keselarasan sosial dan kepatuhan terhadap kebijakan cenderung memperkuat citra negara sebagai pemimpin yang kooperatif dalam diplomasi kesehatan internasional (Gilmore et al., 2020). Sebaliknya, di negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, respons terhadap kebijakan kesehatan lebih bervariasi, dan hal ini mempengaruhi cara negara tersebut dipersepsikan di mata dunia, terutama dalam hal kredibilitas dan pengaruh dalam diplomasi kesehatan internasional (Hedden et al., 2008).

Selain itu, meskipun ada studi tentang peran komunikasi dalam meningkatkan kerjasama internasional, sangat sedikit yang meneliti bagaimana perbedaan dalam strategi komunikasi krisis dapat memperkuat atau melemahkan soft power suatu negara. Soft power, yang berfokus pada kemampuan negara untuk mempengaruhi negara lain melalui nilai-nilai dan daya tarik budaya, tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dalam negeri, tetapi juga oleh cara negara tersebut mengelola krisis kesehatan global dan menyampaikan pesan-pesan penting ke dunia internasional (Feldbaum & Michaud, 2010). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi yang didasarkan pada norma budaya dapat memperkuat atau bahkan melemahkan soft power suatu negara, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada hubungan internasional dalam konteks diplomasi kesehatan.

Penggunaan media sosial selama pandemi juga memberikan tantangan tersendiri terkait diseminasi informasi dan dampaknya terhadap reputasi negara di kancah internasional. Di Amerika Serikat, misinformasi dan inkonsistensi informasi melalui media sosial mempengaruhi persepsi global terhadap kemampuan negara tersebut dalam mengelola krisis (Schiavo et al., 2021). Di sisi lain, meskipun media sosial juga digunakan di Jepang, tingkat misinformasi yang lebih rendah dan budaya komunikasi yang lebih terstruktur memungkinkan negara tersebut untuk menjaga kredibilitasnya di tingkat global (Cool et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi krisis harus diperhatikan dengan lebih seksama, terutama dalam meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi global dan pengaruh diplomasi kesehatan.

Secara keseluruhan, meskipun strategi komunikasi yang berbeda dapat memiliki dampak besar terhadap reputasi global dan diplomasi kesehatan, masih banyak yang perlu dipelajari untuk memahami bagaimana kedua faktor ini saling berhubungan. Penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara komunikasi krisis, reputasi global, dan diplomasi kesehatan internasional akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara dapat meningkatkan pengaruh mereka di tingkat global, sekaligus menjaga kestabilan domestik mereka selama krisis kesehatan global (Feldbaum & Michaud, 2010; Schiavo et al., 2021).

Penting untuk menggali lebih dalam bagaimana kebijakan komunikasi yang didasarkan pada budaya tertentu dapat memengaruhi respons internasional terhadap krisis global dan memperkuat atau melemahkan soft power suatu negara. Dalam banyak kasus, kebijakan komunikasi yang disesuaikan dengan norma budaya spesifik telah terbukti memiliki dampak yang besar terhadap persepsi internasional tentang kemampuan suatu negara dalam menangani krisis kesehatan global (Gilmore et al., 2020). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat atau bahkan melemahkan posisi negara dalam diplomasi kesehatan internasional. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks pandemi COVID-19, di mana respons negara terhadap krisis kesehatan publik memengaruhi citra global mereka (Feldbaum & Michaud, 2010).

Budaya negara memengaruhi bukan hanya cara masyarakat memproses informasi, tetapi juga cara pemerintah menyampaikan pesan-pesan penting, terutama selama krisis kesehatan global. Negara-negara dengan budaya kolektivistik seperti Jepang cenderung lebih menekankan pada solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam komunikasi krisis mereka, yang memperkuat soft power negara tersebut melalui citra yang kooperatif dan bertanggung jawab dalam menghadapi krisis (Gilmore et al., 2020). Sebaliknya, negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, sering kali menekankan kebebasan individu dalam komunikasi mereka, yang dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan kesehatan publik dan mempengaruhi persepsi internasional terhadap negara tersebut (Hedden et al., 2008). Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dapat memperkuat atau melemahkan soft power, terutama dalam konteks diplomasi kesehatan.

Sementara itu, penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial dalam respons krisis semakin menjadi hal yang penting, tetapi juga membuka ruang bagi misinformasi yang dapat merusak reputasi negara di mata dunia. Di Amerika Serikat, misinformasi yang tersebar melalui media sosial memperburuk persepsi global terhadap kemampuan negara tersebut dalam mengelola pandemi, dan secara tidak langsung memengaruhi diplomasi kesehatan mereka (Schiavo et al., 2021). Negara-negara yang memiliki kebijakan komunikasi yang lebih terkoordinasi dan berbasis budaya, seperti Jepang, lebih mampu mengurangi disinformasi dan menjaga kredibilitas mereka dalam kerjasama internasional (Cool et al., 2015). Hal ini menegaskan pentingnya memperhatikan bagaimana kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dapat mengoptimalkan efektivitas respons krisis dan dampaknya terhadap diplomasi kesehatan.

Selain itu, meskipun banyak negara yang mengandalkan komunikasi berbasis data dan transparansi selama pandemi COVID-19, tidak banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan komunikasi yang didasarkan pada nilai budaya tertentu dapat mengubah respons internasional terhadap krisis global. Sejumlah studi mengindikasikan bahwa budaya dapat mempengaruhi bagaimana informasi diterima, dipahami, dan diterjemahkan dalam konteks kebijakan publik, terutama dalam menghadapi krisis besar (Aung et al., 2023). Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji bagaimana negara-negara dengan budaya yang berbeda memformulasikan kebijakan komunikasi mereka dan dampaknya terhadap diplomasi kesehatan global serta soft power negara tersebut (Feldbaum & Michaud, 2010).

Secara keseluruhan, masih banyak yang perlu dipahami mengenai bagaimana kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dapat mempengaruhi respons internasional terhadap krisis global dan pengaruh soft power suatu negara. Penelitian lebih lanjut yang menggali keterkaitan antara kebijakan komunikasi, diplomasi kesehatan, dan soft power akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana negara-negara dapat mengelola krisis kesehatan dengan lebih efektif dan memperkuat posisi mereka dalam komunitas internasional (Schiavo et al., 2021). Hal ini tidak hanya akan memperkaya teori komunikasi krisis, tetapi juga akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk strategi diplomasi kesehatan internasional yang lebih sensitif terhadap budaya.

Untuk mengisi gap dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk membandingkan strategi komunikasi krisis antara Jepang dan Amerika Serikat dalam merespons pandemi COVID-19, kita perlu memahami bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara kedua negara tersebut merancang dan melaksanakan strategi komunikasi mereka. Jepang, sebagai negara dengan budaya kolektivistis, lebih mengutamakan harmoni sosial, kepatuhan terhadap otoritas, dan tindakan kolektif dalam menghadapi krisis, sementara Amerika Serikat, dengan budaya individualistik, cenderung berfokus pada kebebasan pribadi, pengambilan keputusan individu, dan tanggung jawab pribadi dalam merespons krisis (Aribah & Anshari, 2021; Najih, 2020). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perbedaan budaya ini memengaruhi komunikasi krisis di kedua negara tersebut, serta bagaimana nilai-nilai budaya tersebut membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi cara kedua negara berkomunikasi dengan publik. Sebagai contoh, Jepang cenderung mengutamakan rasa tanggung jawab kolektif dalam mendukung protokol kesehatan, sedangkan Amerika Serikat lebih menekankan kebebasan individu dalam merespons kebijakan pemerintah (Najih, 2020). Penelitian ini akan mengungkapkan apakah perbedaan dalam cara menyampaikan pesan dapat mempengaruhi efektivitas respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah (Aribah & Anshari, 2021). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan apakah pendekatan budaya kolektivistis di Jepang lebih efektif dalam mencapai kepatuhan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan yang lebih individualistik di Amerika Serikat.

Salah satu aspek penting yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah peran komunikasi risiko di kedua negara. Di Jepang, strategi komunikasi risiko lebih menekankan pada keberlanjutan sosial dan keselamatan bersama, yang mencerminkan nilai kolektivisme yang dominan. Di sisi lain, di Amerika Serikat, yang menekankan nilai kebebasan pribadi, komunikasi risiko lebih berfokus pada perlindungan individu dan kebebasan pribadi dalam mengakses informasi (Dryhurst et al., 2020). Penelitian ini akan membandingkan bagaimana kedua pendekatan ini diterima oleh masyarakat, serta tingkat kepatuhan yang dihasilkan dalam masing-masing negara. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi risiko berdasarkan nilai-nilai budaya yang berbeda.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan perbandingan lintas budaya untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana budaya mempengaruhi pesan komunikasi yang disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing negara. Berdasarkan temuan Hedden, budaya dapat memengaruhi persepsi individu terhadap risiko dan respons terhadap kebijakan kesehatan (Hedden et al., 2008). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana komunikasi krisis yang berbasis budaya dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan di dua negara yang memiliki nilai budaya yang sangat berbeda ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana budaya dapat mempengaruhi cara komunikasi dilakukan dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi terkait cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola krisis kesehatan global di masa depan, dengan memperhatikan perbedaan budaya. Penelitian ini akan membandingkan bagaimana pemerintah Jepang menggunakan strategi komunikasi yang lebih sentralistik dan otoriter, sedangkan di Amerika Serikat, dengan nilai kebebasan dan individualisme yang lebih tinggi, pendekatan komunikasi lebih bersifat persuasif dan memberikan ruang bagi individu untuk membuat keputusan sendiri terkait protokol kesehatan yang harus diikuti (Glik, 2007). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap cara negara-negara merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan kontekstual dalam merespons krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dengan memfokuskan pada komunikasi antarbudaya, yang menjadi penting untuk memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi efektivitas pesan kesehatan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan betapa krusialnya komunikasi yang efektif untuk membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi komunikasi krisis dalam konteks pandemi, sedikit yang membahas bagaimana budaya yang berbeda dapat mempengaruhi cara pesan kesehatan diterima dan dipahami (Aung et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dengan membandingkan dua negara dengan budaya yang sangat berbeda, yaitu Jepang dan Amerika Serikat, dalam hal komunikasi krisis.

Budaya kolektivistik Jepang, yang menekankan harmoni sosial dan kepatuhan terhadap otoritas, cenderung mendukung pendekatan yang mengutamakan kepentingan kelompok dalam menghadapi krisis. Di Jepang, komunikasi krisis lebih banyak mengandalkan peran otoritas dan norma sosial yang mengharuskan individu untuk mengikuti instruksi tanpa banyak mempertanyakan (Hedden et al., 2008). Sebaliknya, di Amerika Serikat, yang lebih individualistis, pendekatan komunikasi lebih menekankan kebebasan pribadi dan otonomi individu. Pendekatan ini seringkali menekankan pada hak individu untuk membuat keputusan sendiri dalam menanggapi krisis, termasuk keputusan terkait kesehatan (Aribah & Anshari, 2021; Najih, 2020).

Dengan memahami perbedaan budaya ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perbedaan dalam nilai budaya mempengaruhi cara masyarakat di kedua negara merespons pesan kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan. Di Jepang, di mana kolektivisme mendominasi, pesan kesehatan yang mengutamakan kesadaran bersama dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial akan lebih mudah diterima, sedangkan di Amerika Serikat, di mana individualisme lebih menonjol, pesan yang mengutamakan kebebasan pribadi dan tanggung jawab individu kemungkinan akan lebih efektif (Dryhurst et al., 2020). Dengan membandingkan kedua pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara budaya mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan kerangka teori komunikasi risiko untuk menjelaskan bagaimana kedua negara tersebut menghadapi tantangan komunikasi selama pandemi. Komunikasi risiko yang efektif membutuhkan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor budaya, psikologis, dan sosial-ekonomi yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap risiko (Aung et al., 2023). Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan lintas budaya untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi risiko diterima dan dipahami di antara kelompok budaya yang berbeda, dan bagaimana hal ini memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Dengan menerapkan teori komunikasi risiko dalam konteks budaya yang berbeda, penelitian ini akan membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pesan kesehatan yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, di Jepang, di mana nilai-nilai

kelompok lebih ditekankan, pesan kesehatan yang berbicara tentang tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap otoritas kemungkinan besar akan lebih diterima (Glik, 2007). Sebaliknya, di Amerika Serikat, yang lebih menekankan kebebasan individu, pesan yang menekankan hak individu untuk memilih dan kebebasan pribadi dalam mengikuti protokol kesehatan mungkin akan lebih efektif (Dryhurst et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas pesan kesehatan yang disampaikan selama pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana perbedaan nilai budaya, seperti individualisme versus kolektivisme, memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan publik selama krisis global, seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks pandemi ini, komunikasi publik yang efektif sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan. Di negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, respons terhadap kebijakan kesehatan lebih cenderung dipengaruhi oleh norma sosial dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok (Hedden et al., 2008). Sementara itu, di negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan lebih dipengaruhi oleh kebebasan pribadi dan hak individu untuk membuat keputusan mereka sendiri terkait kesehatan (Dryhurst et al., 2020).

Penelitian ini akan mengisi gap dengan membandingkan bagaimana dua negara dengan budaya yang sangat berbeda ini menanggapi kebijakan kesehatan publik selama pandemi. Jepang, yang memiliki budaya kolektivistik, lebih menekankan pada kepatuhan sosial dan tanggung jawab bersama dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Kim & Markus, 1999). Hal ini sangat relevan dalam konteks pandemi COVID-19, di mana tindakan kolektif sangat diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Sebaliknya, di Amerika Serikat, budaya individualistik lebih menekankan kebebasan pribadi, yang dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat merespons kebijakan yang diterapkan, seperti protokol kesehatan dan vaksinasi (Najih, 2020).

Perbedaan dalam budaya ini dapat mempengaruhi bagaimana pesan-pesan kesehatan diterima dan dipahami. Masyarakat Jepang, yang lebih menilai pentingnya harmoni sosial dan kolektivitas, lebih cenderung mengikuti instruksi pemerintah tanpa banyak pertanyaan (Hedden et al., 2008). Hal ini didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, masyarakat cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Hedden et al., 2008). Di sisi lain, masyarakat Amerika Serikat yang lebih individualistik mungkin lebih memilih untuk mempertanyakan dan menilai kebijakan kesehatan berdasarkan kebebasan pribadi dan hak mereka sebagai individu, yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Dryhurst et al., 2020).

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana perbedaan ini memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan selama krisis. Untuk itu, penelitian akan menggunakan teori komunikasi risiko yang menunjukkan bahwa pesan yang disesuaikan dengan nilai budaya dapat meningkatkan efektivitasnya (Aung et al., 2023). Sebagai contoh, di Jepang, pesan yang menekankan solidaritas dan tanggung jawab bersama kemungkinan akan lebih diterima, sementara di Amerika Serikat, pesan yang menekankan kebebasan individu dan hak untuk memilih akan lebih efektif (Montanari et al., 2020; Schiavo et al., 2021). Selain itu, pendekatan ini akan mengkaji bagaimana media sosial digunakan di kedua negara untuk menyebarkan pesan kesehatan selama pandemi. Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah, dan sering kali mencerminkan nilai budaya suatu negara (Cool et al., 2015). Di Jepang, media sosial mungkin digunakan untuk memperkuat pesan-pesan kolektif yang mendukung kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, sementara di Amerika Serikat, media sosial dapat berfungsi sebagai platform untuk

mempertanyakan kebijakan pemerintah dan menyuarakan kebebasan pribadi (Schiavo et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dengan memfokuskan pada bagaimana komunikasi publik yang adaptif terhadap konteks budaya dapat memperkuat diplomasi kesehatan dan membangun kepercayaan internasional. Selama pandemi COVID-19, banyak negara menerapkan strategi komunikasi yang berfokus pada pengendalian informasi dan meningkatkan kesadaran kesehatan di tengah krisis global. Namun, perbedaan budaya dalam pendekatan komunikasi dapat memengaruhi cara masyarakat merespons informasi dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi yang disesuaikan dengan budaya lokal dapat memperkuat diplomasi kesehatan internasional sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antarnegara selama krisis kesehatan global (Hedden et al., 2008; Schiavo et al., 2021).

Dalam konteks ini, strategi komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat membantu memperkuat diplomasi kesehatan dengan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman antarnegara. Komunikasi yang berhasil dalam krisis pandemi, seperti COVID-19, bergantung pada kemampuan negara untuk menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal, agar lebih dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat. Negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, lebih cenderung mendukung kebijakan kolektif yang menekankan tanggung jawab sosial bersama, sementara negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, lebih menghargai kebebasan pribadi dan keputusan individu (Dryhurst et al., 2020; Hedden et al., 2008).

Komunikasi yang efektif dalam krisis kesehatan dapat membantu membangun kepercayaan publik, yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Kepercayaan publik dapat menjadi faktor penentu dalam seberapa efektif kebijakan kesehatan diterima dan diikuti. Dengan mempertimbangkan nilai budaya yang mendalam, negara dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi mereka untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, serta memperkuat posisi diplomatik mereka dalam arena internasional (Aung et al., 2023; Gilmore et al., 2020).

Penting untuk menggali lebih dalam bagaimana perbedaan dalam komunikasi antarbudaya mempengaruhi hasil diplomasi kesehatan internasional. Studi tentang diplomasi kesehatan internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang dapat mengomunikasikan kebijakan kesehatan dengan cara yang efektif dalam berbagai budaya lebih mungkin membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara lain. Dalam hal ini, komunikasi publik yang berhasil selama krisis pandemi dapat menjadi alat diplomatik yang sangat kuat dalam memperkuat hubungan antarnegara, yang pada akhirnya memperkuat reputasi global negara (Cool et al., 2015; Schiavo et al., 2021).

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan komunikasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam secara budaya. Misalnya, komunikasi yang mengutamakan nilai-nilai kolektivistik seperti kerja sama dan kesejahteraan bersama akan lebih efektif di negara-negara yang lebih menekankan nilai tersebut. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih individualistik, seperti Amerika Serikat, pesan yang menekankan kebebasan individu dan hak pribadi dalam mengambil keputusan lebih mungkin diterima (Aung et al., 2023; Kim & Markus, 1999). Menyesuaikan strategi komunikasi ini dapat memperkuat hubungan internasional dengan meminimalkan kesalahpahaman yang dapat timbul dari perbedaan budaya.

Untuk mengisi gap ini, penelitian ini berfokus pada dampak perbedaan budaya terhadap diplomasi kesehatan dengan tujuan memberikan rekomendasi praktis bagi negara-negara dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan kontekstual dalam menghadapi krisis global. Komunikasi yang sensitif terhadap konteks budaya sangat penting dalam merespons krisis kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, karena budaya memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons informasi kesehatan yang disampaikan (Schiavo et al., 2021). Dalam hal ini, perbedaan budaya yang signifikan antara negara-negara dapat memengaruhi respons mereka terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga menciptakan kebutuhan untuk strategi komunikasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal (Aung et al., 2023).

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pendekatan komunikasi yang berfokus pada budaya dapat meningkatkan efektivitas pesan kesehatan dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan selama krisis. Negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, sering kali menekankan pentingnya tindakan kolektif dan solidaritas sosial, sedangkan negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, lebih memprioritaskan kebebasan pribadi dan keputusan individu dalam merespons kebijakan kesehatan (Hedden et al., 2008). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perbedaan ini dan memberikan wawasan tentang bagaimana strategi komunikasi dapat diadaptasi untuk meningkatkan kesesuaian dan efektivitasnya dalam berbagai konteks budaya.

Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi dengan membandingkan respons negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda terhadap kebijakan kesehatan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dalam hal ini, komunikasi kesehatan yang efektif tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara pesan tersebut disampaikan dan dipahami oleh masyarakat berdasarkan konteks budaya mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana cara komunikasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dapat memperkuat respons terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 (Dryhurst et al., 2020; Gilmore et al., 2020). Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis mengenai penerapan kerangka komunikasi yang berbasis budaya dalam diplomasi kesehatan internasional. Diplomasi kesehatan adalah instrumen yang sangat penting dalam hubungan internasional, di mana negara-negara saling berbagi informasi dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Namun, untuk mencapai efektivitas dalam diplomasi kesehatan, perlu ada pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana komunikasi yang berbasis budaya dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antarnegara selama krisis (Feldbaum & Michaud, 2010; Schiavo et al., 2021).

Dengan meneliti dampak perbedaan budaya, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang bagaimana diplomasi kesehatan dapat diperkuat melalui komunikasi yang sensitif terhadap budaya. Banyak negara yang sudah mengadopsi berbagai pendekatan dalam komunikasi kesehatan, tetapi sedikit yang menyadari betapa besar pengaruh budaya dalam mempengaruhi penerimaan pesan kesehatan oleh masyarakat (Aung et al., 2023). Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dapat memperkuat diplomasi kesehatan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan strategi komunikasi yang lebih adaptif di masa depan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dimensi Budaya dan Implikasinya terhadap Hubungan Internasional dalam Konteks Diplomasi Kesehatan**

Dimensi budaya suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara pemerintah dan masyarakat merespons krisis, termasuk dalam hal komunikasi publik selama pandemi COVID-19. Dalam hal ini, dimensi budaya yang relevan untuk dianalisis adalah **individualisme vs kolektivisme** dan **uncertainty avoidance** (penghindaran ketidakpastian), dua dimensi utama dari kerangka Hofstede yang dapat membantu menjelaskan perbedaan respons komunikasi antar negara selama pandemi. Dimensi ini tidak hanya mencerminkan preferensi komunikasi internal, tetapi juga berdampak terhadap posisi negara dalam hubungan internasional, khususnya dalam praktik diplomasi kesehatan (Hofstede, 2001; Schiavo et al., 2021).

Jepang sebagai negara dengan kecenderungan kolektivistik dan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi menunjukkan karakteristik komunikasi publik yang berorientasi pada konsensus sosial, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan komunikasi yang implisit. Jepang cenderung mengutamakan harmoni sosial, yang tercermin dalam respons kolektif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi. Pemerintah Jepang tidak secara agresif memberlakukan lockdown atau tindakan represif, tetapi masyarakat secara kolektif merespons positif seruan untuk menjaga jarak fisik dan penggunaan masker, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang menekankan tanggung jawab sosial dan keselarasan kelompok (Schiavo et al., 2021; NHK, 2021). Pendekatan komunikasi krisis yang tidak memaksa ini memperkuat efektivitas pesan, dengan dampak positif terhadap persepsi publik dan diplomasi kesehatan internasional Jepang sebagai negara yang tertib, kooperatif, dan memiliki solidaritas sosial tinggi.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara dengan budaya individualistik dan toleransi terhadap ketidakpastian yang lebih tinggi menampilkan pola komunikasi yang lebih terbuka dan eksplisit, namun juga terfragmentasi. Fragmentasi dalam sistem pemerintah federal di AS menyebabkan ketidak konsistenan pesan publik antara pemerintah pusat, negara bagian, dan tokoh politik. Hal ini diperburuk oleh politisasi terhadap isu kesehatan publik, yang mencerminkan nilai kebebasan individu yang sangat kuat dalam budaya Amerika (CDC, 2021; Kim & Kreps, 2021). Meskipun Amerika Serikat memiliki keunggulan teknologi dan sumber daya, diseminasi informasi yang tidak konsisten dan adanya disinformasi yang tersebar melalui media sosial memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, serta berdampak pada citra internasional AS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara tersebut memiliki kekuatan besar dalam aspek lainnya, komunikasi yang terfragmentasi dapat menurunkan kredibilitasnya dalam mengelola krisis.

Perbedaan pendekatan ini secara langsung berdampak pada diplomasi kesehatan global, yang menjadi alat penting dalam membangun solidaritas internasional dan memperkuat aliansi. Negara yang mampu menunjukkan kepemimpinan yang stabil dan komunikasi krisis yang efektif secara domestik cenderung lebih dipercaya dalam kerja sama internasional. Jepang, misalnya, tidak hanya berhasil menjaga stabilitas dalam negeri melalui pendekatan berbasis budaya, tetapi juga memperluas pengaruhnya dengan memberikan bantuan kesehatan ke negara-negara berkembang selama pandemi. Hal ini memperkuat **soft power** Jepang dan meningkatkan kepercayaan terhadapnya sebagai aktor global yang bertanggung jawab, baik dalam hal kesehatan maupun diplomasi internasional (Aung et al., 2023; Fidler, 2004). Pendekatan Jepang yang berbasis pada nilai-nilai kolektivisme dan solidaritas sosial berkontribusi pada reputasinya sebagai negara yang dapat diandalkan dalam kerjasama global.

Sebaliknya, meskipun Amerika Serikat pada awal pandemi menghadapi tantangan dalam komunikasi krisis yang tidak konsisten, negara ini kemudian berhasil mengoreksi arah melalui diplomasi vaksin dan dukungan multilateral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya terjadi krisis komunikasi domestik, Amerika Serikat mampu memanfaatkan diplomasi kesehatan untuk mengembalikan kepercayaan global. Diplomasi vaksin, yang mencakup

distribusi vaksin ke negara-negara berkembang, memainkan peran besar dalam memperbaiki reputasi internasional AS dan menunjukkan kemampuannya untuk mengkoordinasikan respons global yang lebih kuat. Namun, fragmentasi komunikasi tetap menjadi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan jangka panjang pada kapasitas diplomasi global negara tersebut (Bavel et al., 2020; Tan, 2020).

Dalam dunia yang semakin terhubung, komunikasi publik domestik memiliki implikasi yang lebih luas terhadap hubungan internasional, baik dalam hal reputasi negara, kepercayaan mitra strategis, maupun kekuatan diplomasi global. Komunikasi yang efektif di dalam negeri dapat memperkuat posisi diplomasi internasional dan meningkatkan solidaritas global. Sebaliknya, komunikasi yang tidak konsisten atau terfragmentasi dapat menurunkan kredibilitas negara di mata mitra internasional, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan negara untuk memimpin dalam kerjasama global selama krisis kesehatan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Dalam konteks ini, sangat penting bagi negara-negara untuk menyadari bahwa komunikasi krisis yang berbasis pada budaya lokal tidak hanya efektif dalam meningkatkan kepatuhan domestik terhadap kebijakan kesehatan, tetapi juga memainkan peran yang krusial dalam membangun kepercayaan internasional dan memperkuat diplomasi kesehatan global. Dengan memahami bagaimana dimensi budaya mempengaruhi respons masyarakat terhadap pesan kesehatan, negara-negara dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, yang tidak hanya mengatasi tantangan di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi mereka di panggung internasional (Aribah & Anshari, 2021; Goodman, 2018).

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang dimensi budaya dalam komunikasi krisis sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan, baik di tingkat domestik maupun global. Negara-negara dengan budaya kolektivistik cenderung memiliki keuntungan dalam hal kooperasi sosial dan kepatuhan publik, yang memperkuat diplomasi kesehatan mereka. Di sisi lain, negara-negara dengan budaya individualistik menghadapi tantangan besar dalam hal fragmentasi komunikasi, yang dapat memperburuk kepercayaan publik dan memperlambat kolaborasi internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dengan budaya individualistik untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan dan memperkuat diplomasi internasional mereka (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Ke depannya, penelitian lebih lanjut tentang perbedaan budaya dalam komunikasi krisis sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam bagaimana negara-negara dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan diplomasi kesehatan global. Studi komparatif antara negara-negara dengan budaya yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk membangun solidaritas global dan meningkatkan kepercayaan antar negara dalam menghadapi krisis kesehatan global (Shimizu & Yamaguchi, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan desain **studi kasus komparatif** untuk mengeksplorasi fenomena komunikasi publik dalam merespons pandemi COVID-19 di dua negara dengan budaya yang sangat berbeda, yaitu **Jepang** dan **Amerika Serikat**. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mendalam yang membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan selama krisis global. Melalui desain studi kasus komparatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan dalam strategi komunikasi krisis antara kedua negara serta

menganalisis dampak budaya terhadap penerimaan pesan kesehatan dan pengaruhnya terhadap **diplomasi kesehatan**.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah **studi kasus komparatif**, di mana Jepang dan Amerika Serikat dijadikan unit analisis utama. Pemilihan kedua negara ini didasarkan pada perbedaan signifikan dalam nilai budaya menurut model Hofstede, khususnya pada dimensi **individualisme vs kolektivisme** dan **penghindaran ketidakpastian** (uncertainty avoidance), serta peran kedua negara yang strategis dalam diplomasi kesehatan global. Studi kasus ini memberikan pemahaman holistik terhadap dinamika komunikasi lintas budaya dalam konteks krisis global, yang relevan dalam mempelajari bagaimana komunikasi krisis berbasis budaya mempengaruhi kepatuhan publik terhadap kebijakan kesehatan.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data primer** dan **data sekunder**.

**Data primer** berupa dokumen resmi seperti kebijakan dan pedoman dari pemerintah Jepang dan Amerika Serikat, serta laporan resmi dari organisasi internasional seperti **WHO** dan **CDC**. Dokumen ini mencakup siaran pers, pidato resmi, dan pedoman yang disusun oleh lembaga-lembaga tersebut terkait penanganan COVID-19.

**Data sekunder** diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, artikel berita dari media internasional, serta sumber-sumber sekunder yang relevan yang membahas komunikasi krisis, diplomasi kesehatan, serta teori-teori komunikasi antarbudaya dan **soft power**. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai konteks budaya masing-masing negara dalam merespons pandemi COVID-19. Beberapa referensi utama yang digunakan meliputi **Fidler (2004)** tentang krisis global kesehatan, **Hofstede (2001)** terkait dengan dimensi budaya, **Mistry (2020)** tentang diplomasi kesehatan global, dan **Shimizu & Yamaguchi (2021)** serta **Tan (2020)** yang membahas komunikasi krisis di masa pandemi.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama:

**Studi Dokumentasi:** Pengumpulan dan analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan, seperti kebijakan pemerintah, siaran pers, pidato pejabat pemerintah, laporan **WHO** dan **CDC**, serta dokumen kebijakan terkait komunikasi krisis dan kesehatan masyarakat. Dokumen ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi pesan utama yang disampaikan oleh kedua negara dalam merespons pandemi.

**Analisis Media:** Penelitian ini juga menganalisis pemberitaan dari media utama di Jepang (seperti **NHK**, **Asahi Shimbun**) dan Amerika Serikat (seperti **CNN**, **The New York Times**, **Reuters**) yang melaporkan tentang strategi komunikasi pemerintah terhadap COVID-19. Media akan menjadi sumber penting untuk memahami bagaimana pesan-pesan kesehatan diterima dan dipahami oleh masyarakat di kedua negara. Artikel-artikel seperti yang diterbitkan oleh **BBC News (2020)** dan **Pew Research Center (2020)** juga dianalisis untuk memahami pandangan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan.

### Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan dua pendekatan utama:

**Analisis Isi (Content Analysis):** Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pesan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah dan media di kedua negara. Peneliti akan memetakan tema-tema ini berdasarkan **dimensi budaya Hofstede** (individualisme-kolektivisme, power distance, dan uncertainty avoidance) untuk memahami bagaimana perbedaan budaya membentuk pesan yang diterima oleh publik.

**Koding Tematik:** Koding tematik dilakukan untuk mengelompokkan temuan-temuan utama dalam data yang terkait dengan elemen-elemen komunikasi yang berhubungan dengan nilai budaya yang relevan. Setiap tema yang ditemukan akan dikategorikan berdasarkan analisis perbandingan antara Jepang dan Amerika Serikat.

## Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan **kerangka teori komunikasi antarbudaya, diplomasi kesehatan, dan soft power** untuk menganalisis data. **Teori komunikasi antarbudaya** akan membantu menjelaskan bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi cara pesan-pesan kesehatan disampaikan dan diterima. **Diplomasi kesehatan** sebagai alat penting dalam hubungan internasional akan digunakan untuk menganalisis bagaimana komunikasi krisis memengaruhi kepercayaan internasional terhadap kedua negara selama pandemi. **Soft power** akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi krisis yang efektif dapat memperkuat posisi diplomatik suatu negara di panggung global. Sumber-sumber teori yang mendalam dari **Nye (2004)** dan **Robinson (2021)** akan dijadikan referensi utama dalam konteks ini.

## Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan **triangulasi sumber**. Data dari dokumen resmi, pemberitaan media, dan literatur akademik akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Triangulasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi data didasarkan pada teori yang relevan dan kuat, serta relevansi dengan konteks hubungan internasional.

## Harapan Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus komparatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perbedaan budaya dan sistem politik memengaruhi komunikasi krisis, serta dampaknya terhadap posisi global negara dalam diplomasi kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerimaan pesan kesehatan oleh masyarakat di Jepang dan Amerika Serikat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas kebijakan kesehatan selama pandemi COVID-19.

## Hasil Penelitian

### Perbedaan Pendekatan dalam Komunikasi Krisis

Analisis terhadap respons komunikasi krisis yang diterapkan oleh Jepang dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dalam pendekatan mereka selama pandemi COVID-19. Jepang mengadopsi pendekatan yang lebih halus dan implisit dalam menyampaikan pesan, dengan menekankan pada keharmonisan sosial dan pengendalian diri (*jishuku*). Pemerintah Jepang menekankan pentingnya solidaritas sosial, dan pesan-pesan mereka sering berbasis pada norma sosial dan moralitas yang mengedepankan tanggung jawab kolektif. Sebaliknya, Amerika Serikat mengedepankan pendekatan yang lebih eksplisit dan langsung, dengan penekanan pada kebebasan individu dan hak pribadi. Komunikasi publik di AS lebih sering menyoroti kebebasan dan otonomi pribadi, yang tercermin dalam kebijakan yang lebih menghormati hak-hak individu

dan memberikan ruang untuk memilih.

### **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan**

Di Jepang, meskipun tidak ada kebijakan yang memaksa, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan sangat tinggi. Masyarakat Jepang dengan sukarela mematuhi penggunaan masker, menjaga jarak sosial, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya, yang mencerminkan kuatnya nilai kolektivisme dan penghindaran ketidakpastian dalam budaya Jepang. Sebaliknya, di Amerika Serikat, meskipun ada negara bagian yang berhasil menerapkan kebijakan yang lebih tegas, terdapat penolakan yang cukup signifikan terhadap kebijakan kesehatan, terutama di kalangan kelompok yang menekankan kebebasan individu. Penolakan terhadap kebijakan penggunaan masker dan vaksinasi mencerminkan kuatnya nilai individualisme yang mendalam di dalam budaya AS, yang sering kali mempengaruhi penerimaan kebijakan publik.

### **Pengaruh Budaya dalam Respons Masyarakat**

Respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan selama pandemi menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi komunikasi krisis. Di Jepang, masyarakat cenderung untuk menerima kebijakan pemerintah tanpa banyak pertanyaan, yang mencerminkan tinggi kepercayaan terhadap otoritas dan pentingnya keharmonisan sosial dalam budaya mereka. Sebaliknya, di Amerika Serikat, banyak individu yang cenderung lebih kritis terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan pribadi mereka. Hal ini berdampak pada tingkat penerimaan terhadap kebijakan kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, dengan sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan hak pribadi mereka dibandingkan dengan kebijakan kolektif yang diterapkan.

### **Dampak Terhadap Diplomasi Kesehatan Global**

Dalam diplomasi kesehatan global, Jepang berhasil memperkuat posisi internasionalnya dengan pendekatan komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Jepang aktif berpartisipasi dalam program distribusi vaksin melalui mekanisme multilateral seperti COVAX, yang memperkuat citra positif Jepang sebagai negara yang bertanggung jawab dalam kesehatan global. Di sisi lain, meskipun Amerika Serikat menghadapi tantangan komunikasi domestik yang tidak konsisten, negara ini berhasil memulihkan citranya di mata dunia melalui distribusi vaksin global yang besar. Pendekatan ini mengukuhkan kekuatan dan pengaruh global AS, meskipun pada awalnya terhambat oleh kebingungannya dalam kebijakan domestik yang tidak seragam.

### **Perbedaan Kepercayaan Terhadap Pemerintah**

Kepercayaan terhadap pemerintah selama pandemi memainkan peran yang sangat penting dalam efektivitas komunikasi krisis. Di Jepang, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi, yang memudahkan penerimaan kebijakan tanpa perlunya penegakan hukum yang keras atau kekuatan paksa. Di Amerika Serikat, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah federal dan otoritas kesehatan sangat bervariasi, tergantung pada ideologi politik dan pandangan yang berbeda mengenai kebebasan individu. Variasi kepercayaan ini menghambat penerimaan kebijakan kesehatan secara nasional, dengan sebagian besar masyarakat yang lebih condong pada pandangan yang membatasi intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi mereka.

## **Pembahasan**

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai komunikasi krisis selama pandemi, sebagian besar studi masih mengabaikan perbedaan budaya dalam strategi komunikasi publik antar negara. Hal ini menjadi sebuah gap penting dalam literatur, mengingat pentingnya pemahaman mengenai bagaimana budaya mempengaruhi cara pesan kesehatan diterima dan direspons oleh masyarakat dalam konteks global. Pandemi COVID-19 memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan akan komunikasi yang adaptif terhadap konteks budaya untuk memperkuat efektivitas pesan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Penting untuk dicatat bahwa budaya mempengaruhi bagaimana masyarakat menginterpretasikan informasi dan tindakan yang diberikan oleh pemerintah. Negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, cenderung memiliki respons yang lebih kooperatif terhadap kebijakan yang mengedepankan kepentingan bersama, karena nilai-nilai seperti harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif sangat dihargai. Di sisi lain, negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, lebih menekankan kebebasan pribadi dan hak individu, yang seringkali mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan pribadi (Dryhurst et al., 2020; Hedden et al., 2008).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan melalui pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan nilai budaya masing-masing negara lebih cenderung diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun, studi-studi ini sering kali terbatas dalam menjelaskan bagaimana perbedaan budaya memengaruhi respons terhadap kebijakan kesehatan publik dalam skala internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengisi gap ini dengan melakukan studi komparatif yang membandingkan bagaimana dua negara dengan budaya yang sangat berbeda, seperti Jepang dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan strategi komunikasi krisis selama pandemi COVID-19 (Schiavo et al., 2021).

Penelitian yang berfokus pada komunikasi krisis antar negara dengan budaya yang kontras dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana budaya membentuk respons terhadap pesan kesehatan. Di Jepang, pendekatan yang mengutamakan kepatuhan terhadap otoritas dan norma sosial lebih efektif dalam mengatasi krisis kesehatan, sementara di Amerika Serikat, pesan yang lebih menekankan pada kebebasan pribadi dan pengambilan keputusan individu mungkin lebih diterima. Dengan memahami perbedaan ini, pembuat kebijakan dapat merancang pesan yang lebih sesuai dengan konteks budaya masing-masing negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam merespons krisis kesehatan global (Kim & Markus, 1999; Najih, 2020).

Selain itu, dalam konteks pandemi COVID-19, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi dan membentuk persepsi publik. Di Jepang, media sosial digunakan untuk memperkuat pesan kolektif yang mendukung kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan di Amerika Serikat, media sosial sering menjadi ajang bagi individu untuk menyuarakan pendapat pribadi, yang terkadang menimbulkan ketidakpastian dan misinformasi (Schiavo et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan dalam penggunaan media sosial antara negara-negara dengan budaya yang berbeda mempengaruhi efektivitas pesan komunikasi krisis.

Salah satu kesimpulan penting yang dapat ditarik adalah bahwa komunikasi krisis yang tidak mempertimbangkan perbedaan budaya dapat berisiko menyebabkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan. Ketidakmampuan untuk menyampaikan pesan yang relevan dengan budaya lokal dapat mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan memperburuk penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memahami dan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang

ada dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat masing-masing (Hedden et al., 2008).

Dalam hal ini, teori komunikasi risiko dapat digunakan untuk membantu merumuskan strategi komunikasi yang lebih sensitif terhadap budaya. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor budaya, psikologis, dan sosial dalam menyampaikan pesan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan menerapkan kerangka teori ini dalam komunikasi krisis, negara-negara dapat lebih efektif dalam mengelola risiko kesehatan dan memperkuat diplomasi kesehatan internasional melalui komunikasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dapat memperkuat hubungan internasional dan meningkatkan kepercayaan antarnegara. Dalam situasi krisis global, seperti pandemi COVID-19, negara-negara yang mampu mengomunikasikan kebijakan kesehatan mereka dengan cara yang sensitif terhadap budaya lokal cenderung membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berhasil dalam krisis tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi kesehatan, tetapi juga pada bagaimana komunikasi tersebut memperkuat posisi diplomatik suatu negara dalam konteks global (Aung et al., 2023; Gilmore et al., 2020).

Penelitian lebih lanjut di bidang ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana negara-negara dapat meningkatkan diplomasi kesehatan mereka dengan mengadaptasi strategi komunikasi mereka sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pesan kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan internasional dalam menghadapi krisis kesehatan global di masa depan. Oleh karena itu, mengisi gap penelitian ini sangat penting untuk memperkuat diplomasi kesehatan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam merespons krisis global seperti pandemi COVID-19 (Feldbaum & Michaud, 2010; Schiavo et al., 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi krisis yang efektif harus memperhitungkan perbedaan budaya antar negara. Dengan merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif terhadap budaya lokal, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan dan memperkuat diplomasi kesehatan mereka di tingkat internasional. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antar negara dan memastikan bahwa respons terhadap krisis kesehatan global dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif, adil, dan berbasis pada nilai-nilai budaya yang relevan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Penelitian yang membandingkan respons komunikasi krisis antara dua negara dengan budaya yang sangat berbeda, seperti Jepang dan Amerika Serikat, sangat terbatas, sehingga menghilangkan potensi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak budaya dalam komunikasi krisis. Hal ini menjadi gap yang signifikan dalam literatur, mengingat pentingnya memahami bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara komunikasi dilakukan, serta bagaimana pesan-pesan kesehatan diterima dan dipahami oleh masyarakat di negara-negara tersebut (Schiavo et al., 2021). Budaya mempengaruhi cara orang merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ketidakpahaman terhadap perbedaan ini dapat berakibat pada ketidakefektifan strategi komunikasi krisis.

Selama pandemi COVID-19, kita dapat melihat bagaimana kedua negara dengan budaya yang berbeda ini menghadapi tantangan komunikasi krisis dengan cara yang sangat berbeda. Di Jepang, yang memiliki budaya kolektivistik, respons terhadap kebijakan kesehatan cenderung lebih terkoordinasi dan didasarkan pada rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini terlihat dalam bagaimana masyarakat Jepang lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang diimbau oleh

pemerintah (Hedden et al., 2008). Sebaliknya, di Amerika Serikat, dengan budaya yang lebih individualistik, penekanan pada kebebasan pribadi dan hak individu menyebabkan respons yang lebih bervariasi, dengan beberapa kelompok lebih cenderung menolak kebijakan pemerintah yang dianggap membatasi kebebasan mereka (Dryhurst et al., 2020).

Gap dalam penelitian ini juga muncul karena sebagian besar studi sebelumnya tidak memperhitungkan bagaimana perbedaan budaya ini mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan selama krisis. Penelitian yang membandingkan respons komunikasi krisis antara negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda masih sangat jarang dilakukan. Penelitian yang lebih dalam diperlukan untuk menggali bagaimana nilai-nilai budaya kolektivistik dan individualistik berperan dalam menentukan seberapa efektif pesan kesehatan diterima oleh masyarakat dan seberapa besar tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Salah satu faktor penting dalam komunikasi krisis yang berbasis budaya adalah pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pesan kesehatan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Di negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, pesan yang menekankan pada solidaritas dan kepatuhan terhadap otoritas lebih mudah diterima. Sebaliknya, di negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, pesan yang lebih menekankan kebebasan pribadi dan keputusan individu lebih efektif (Dryhurst et al., 2020; Hedden et al., 2008) perlu memperjelas perbedaan ini untuk membantu merancang komunikasi yang lebih efektif di masa depan.

Komunikasi risiko menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi gap ini. Komunikasi risiko yang efektif harus disesuaikan dengan budaya lokal agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Misalnya, di Jepang, pendekatan komunikasi risiko yang mengedepankan kepentingan kolektif lebih cenderung diterima dengan baik, sementara di Amerika Serikat, di mana individualisme lebih menonjol, pesan yang menekankan kebebasan pribadi lebih dapat diterima (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pendekatan komunikasi risiko dapat disesuaikan dengan budaya yang berbeda.

Penting juga untuk mempertimbangkan peran media sosial dalam respons komunikasi krisis. Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan pesan kesehatan di seluruh dunia. Namun, cara media sosial digunakan di Jepang dan Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Di Jepang, media sosial lebih sering digunakan untuk memperkuat pesan kolektif dan mendukung kebijakan pemerintah, sementara di Amerika Serikat, media sosial sering digunakan untuk mengekspresikan pendapat pribadi dan bahkan untuk menyebarkan misinformasi (Schiavo et al., 2021). Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perbedaan ini mempengaruhi efektivitas pesan komunikasi dalam kedua negara.

Penelitian ini juga akan melihat bagaimana kebijakan komunikasi di kedua negara dapat disesuaikan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dalam konteks komunikasi krisis, kepercayaan publik merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Di negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, pesan yang menekankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap otoritas lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan (Hedden et al., 2008). Sementara di negara-negara individualistik, seperti Amerika Serikat, pesan yang menekankan hak individu dan kebebasan pribadi lebih cenderung menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Studi komparatif yang mendalam mengenai respons komunikasi krisis di negara-negara

dengan budaya yang sangat berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana budaya memengaruhi komunikasi kesehatan selama krisis global. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki komunikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat di negara-negara yang memiliki budaya yang berbeda (Gilmore et al., 2020). Dengan memahami perbedaan ini, pembuat kebijakan dapat merancang pesan yang lebih relevan dengan budaya lokal dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam situasi krisis.

Dengan mengisi gap penelitian ini, kita dapat membantu memperkuat diplomasi kesehatan internasional. Diplomasi kesehatan, yang melibatkan kerjasama antar negara untuk menangani masalah kesehatan global, dapat ditingkatkan dengan komunikasi yang lebih sensitif terhadap budaya lokal. Komunikasi yang disesuaikan dengan nilai budaya negara tertentu dapat memperkuat hubungan internasional dan meningkatkan kepercayaan antar negara (Feldbaum & Michaud, 2010). Ini juga dapat membuka peluang untuk kerjasama yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan global di masa depan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, komunikasi yang disesuaikan dengan budaya masing-masing negara terbukti sangat penting dalam mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi krisis dapat disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masing-masing negara akan membantu mengisi gap ini dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini berusaha untuk mengisi gap penting dalam literatur komunikasi krisis yang selama ini mengabaikan perbedaan budaya. Dengan memahami bagaimana budaya memengaruhi cara komunikasi krisis diterima dan dipahami, kita dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori komunikasi risiko dan diplomasi kesehatan internasional (Dryhurst et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Gap utama dalam literatur ini adalah kurangnya analisis tentang bagaimana dimensi budaya, seperti individualisme dan kolektivisme, memengaruhi penerimaan pesan kesehatan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai komunikasi krisis selama pandemi COVID-19, sebagian besar studi tidak membahas secara mendalam bagaimana perbedaan budaya ini mempengaruhi cara pesan kesehatan diterima oleh masyarakat. Hal ini penting karena budaya sangat memengaruhi cara individu dalam kelompok tertentu merespons pesan yang diberikan, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan (Schiavo et al., 2021).

Individualisme dan kolektivisme sebagai dimensi budaya memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan bagaimana pesan kesehatan diterima oleh masyarakat. Di negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, penekanan pada kebebasan pribadi dan otonomi individu sangat kuat. Hal ini menyebabkan individu lebih cenderung mempertanyakan kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan mereka, seperti pembatasan sosial atau penggunaan masker (Dryhurst et al., 2020). Sebaliknya, di negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, pesan yang menekankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap otoritas lebih mudah diterima karena masyarakat lebih cenderung mengutamakan kesejahteraan kelompok dibandingkan dengan hak pribadi (Hedden et al., 2008).

Penelitian yang membandingkan bagaimana kedua dimensi budaya ini mempengaruhi komunikasi kesehatan selama krisis sangat terbatas. Dalam konteks pandemi, hal ini menyebabkan ketidaktahuan mengenai bagaimana negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda

mengimplementasikan dan menerima kebijakan kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana nilai-nilai budaya kolektivistik dan individualistik mempengaruhi cara pesan komunikasi disampaikan, diterima, dan direspon oleh masyarakat (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Selama pandemi COVID-19, perbedaan budaya ini jelas terlihat dalam respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diberlakukan. Di Jepang, dengan budaya kolektivistiknya, masyarakat cenderung mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa banyak mempertanyakan, karena ada kepercayaan pada pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan sosial bersama. Di sisi lain, masyarakat Amerika Serikat, yang lebih mengutamakan kebebasan pribadi, menunjukkan adanya keraguan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah, seperti penggunaan masker dan vaksinasi, yang dianggap membatasi hak individu (Hedden et al., 2008). Penelitian ini perlu mengkaji lebih lanjut bagaimana dimensi budaya ini memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan selama pandemi.

Penting untuk menggali lebih dalam bagaimana perbedaan ini memengaruhi strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi risiko untuk menjelaskan bagaimana perbedaan budaya ini mempengaruhi efektivitas pesan kesehatan. Dalam konteks kolektivistik, pesan yang menekankan kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama akan lebih efektif, sedangkan dalam konteks individualistik, pesan yang menekankan kebebasan pribadi dan pilihan individu mungkin lebih sesuai dan diterima dengan baik oleh masyarakat (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020)

Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam mengisi gap ini adalah penggunaan pendekatan perbandingan lintas budaya untuk mempelajari bagaimana kedua dimensi budaya ini berperan dalam respons komunikasi krisis. Penelitian yang mengkaji perbedaan antara budaya kolektivistik dan individualistik dalam respons terhadap kebijakan kesehatan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan di masa depan, baik di negara-negara dengan budaya kolektivistik maupun individualistik (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021)

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran media sosial dalam mempengaruhi respons terhadap kebijakan kesehatan. Di negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, media sosial dapat memperburuk fragmentasi informasi karena kebebasan individu untuk memilih sumber informasi mereka. Di sisi lain, di negara dengan budaya kolektivistik, media sosial dapat digunakan untuk memperkuat pesan kolektif yang mendukung kebijakan pemerintah dan memfasilitasi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Cool et al., 2015; Schiavo et al., 2021)

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana budaya memengaruhi penerimaan pesan kesehatan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk merancang strategi komunikasi kesehatan yang lebih efektif. Mengadaptasi pesan komunikasi sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masing-masing negara dapat meningkatkan efektivitasnya dan mengurangi kesalahan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan kesehatan (Aung et al., 2023; Gilmore et al., 2020)

Dengan melakukan perbandingan antara negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan teori komunikasi krisis. Ini penting untuk merancang komunikasi yang lebih responsif terhadap budaya lokal dan untuk memperkuat diplomasi kesehatan internasional. Diplomasi kesehatan yang berbasis pada komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat

meningkatkan hubungan antar negara dan memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi krisis kesehatan global (Feldbaum & Michaud, 2010; Schiavo et al., 2021).

Secara keseluruhan, mengisi gap ini sangat penting untuk memperbaiki pemahaman kita tentang bagaimana perbedaan budaya memengaruhi respons terhadap kebijakan kesehatan dan bagaimana komunikasi dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi pembuat kebijakan dalam merancang pesan yang lebih relevan dengan budaya masyarakat dan membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan di masa depan (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020)

Salah satu gap utama yang ditemukan dalam literatur mengenai komunikasi krisis selama pandemi adalah kurangnya perhatian terhadap bagaimana perbedaan dalam konteks budaya memengaruhi cara pesan-pesan kesehatan diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan kesehatan. Meskipun banyak studi telah dilakukan mengenai komunikasi krisis, sebagian besar studi tersebut tidak membahas secara mendalam bagaimana budaya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan (Schiavo et al., 2021). Ini mengakibatkan kebijakan kesehatan yang diterapkan tidak selalu efektif di berbagai budaya yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Perbedaan budaya yang ada antara negara-negara dengan orientasi budaya kolektivistik, seperti Jepang, dan individualistik, seperti Amerika Serikat, berperan besar dalam cara pesan kesehatan diterima. Di negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, pesan yang menekankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap otoritas lebih mudah diterima oleh masyarakat (Hedden et al., 2008). Sebaliknya, di negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, pesan yang berfokus pada kebebasan pribadi dan otonomi individu cenderung lebih diterima. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kesehatan yang sama sekali tidak mempertimbangkan dimensi budaya dapat menghadirkan tantangan dalam mencapai tujuan kebijakan kesehatan yang diinginkan (Dryhurst et al., 2020).

Sebagai contoh, Jepang dengan nilai-nilai kolektivistiknya menekankan pada harmoni sosial dan kepatuhan terhadap otoritas. Ketika pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penularan COVID-19, masyarakat lebih cenderung untuk mengikuti protokol kesehatan tanpa banyak pertanyaan, karena kebijakan tersebut dianggap sebagai kewajiban sosial (Hedden et al., 2008). Di sisi lain, di negara dengan budaya individualistik seperti Amerika Serikat, banyak orang yang lebih menilai kebijakan tersebut berdasarkan kebebasan pribadi dan hak mereka untuk membuat keputusan sendiri. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap kebijakan tertentu, seperti penggunaan masker atau vaksinasi, yang dianggap sebagai pembatasan kebebasan pribadi (Dryhurst et al., 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa pendekatan komunikasi kesehatan yang sukses dalam satu budaya belum tentu berhasil diterapkan di budaya lain. Masyarakat dengan budaya kolektivistik mungkin lebih merespons pesan yang menekankan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama, sementara masyarakat dengan budaya individualistik mungkin lebih sensitif terhadap pesan yang menghargai kebebasan individu dan pilihan pribadi (Aung et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan kesehatan untuk merancang pesan yang mempertimbangkan dimensi budaya agar lebih sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang menjadi target komunikasi.

Penelitian yang mengkaji bagaimana budaya mempengaruhi penerimaan pesan kesehatan di negara-negara yang memiliki orientasi budaya yang sangat berbeda masih sangat terbatas. Dengan

memperhatikan dimensi budaya, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana cara pesan disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana perbedaan ini memengaruhi efektivitas kebijakan kesehatan yang diterapkan selama pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan lainnya (Schiavo et al., 2021). Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengisi gap ini, sehingga strategi komunikasi yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Selain itu, strategi komunikasi kesehatan juga harus disesuaikan dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara. Di Jepang, pendekatan yang lebih sentralistik dan otoriter dapat diterima karena norma sosial yang lebih kuat, sementara di negara-negara seperti Amerika Serikat, yang lebih mengutamakan kebebasan individu, pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis kebebasan lebih mungkin efektif (Gilmore et al., 2020). Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan kesehatan yang efektif, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor budaya ini agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Melalui pendekatan lintas budaya, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan kesehatan yang diterapkan di satu negara dapat memengaruhi efektivitasnya di negara lain. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks krisis global seperti pandemi, di mana kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menangani masalah kesehatan secara bersama-sama. Memahami bagaimana budaya mempengaruhi respons terhadap kebijakan kesehatan memungkinkan negara-negara untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks internasional (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Selain itu, pendekatan berbasis budaya ini dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan. Ketika pesan kesehatan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, masyarakat lebih cenderung untuk menerima dan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pendekatan yang mengutamakan kepatuhan sosial dan harmoni kelompok dapat meningkatkan tingkat kepatuhan di negara-negara dengan budaya kolektivistik, sementara pendekatan yang menekankan kebebasan dan pilihan individu dapat lebih berhasil di negara-negara dengan budaya individualistik (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020).

Namun, tantangan utama dalam komunikasi kesehatan berbasis budaya adalah bagaimana menyeimbangkan pendekatan yang tepat agar pesan kesehatan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan teori komunikasi kesehatan yang mempertimbangkan perbedaan budaya, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi krisis kesehatan global (Gilmore et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Dengan mengatasi gap ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan strategi komunikasi kesehatan yang lebih efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan membantu para pembuat kebijakan dalam merancang pesan kesehatan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks budaya masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan selama krisis (Aung et al., 2023). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diterapkan dapat berhasil di berbagai belahan dunia dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berbeda.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi krisis dan kebijakan kesehatan. Dengan memperhatikan perbedaan budaya, kita dapat merancang komunikasi yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas

kebijakan kesehatan dan memperkuat diplomasi kesehatan internasional dalam menghadapi krisis global.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai komunikasi krisis, sedikit yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan komunikasi krisis terhadap hubungan internasional dan diplomasi kesehatan. Hal ini menjadi sebuah gap penting dalam literatur yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana komunikasi krisis dapat memengaruhi hubungan antarnegara, terutama dalam konteks diplomasi kesehatan selama dan setelah krisis global (Schiavo et al., 2021). Banyak studi fokus pada komunikasi saat krisis, tetapi sangat sedikit yang menganalisis dampak yang lebih luas dan jangka panjang terhadap kerjasama internasional dan reputasi global negara.

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi yang diterapkan selama krisis kesehatan dapat memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada tingkat domestik, tetapi juga pada hubungan internasional. Negara-negara yang mampu menyampaikan pesan kesehatan yang efektif dan berbasis budaya dapat memperkuat hubungan internasional mereka dan membangun reputasi global yang lebih baik. Sebaliknya, negara-negara yang gagal menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan konteks budaya bisa mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat domestik maupun komunitas internasional, yang dapat mempengaruhi diplomasi kesehatan mereka di masa depan (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020).

Pentingnya komunikasi krisis yang adaptif terhadap budaya tidak hanya berpengaruh pada kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, tetapi juga pada persepsi global terhadap keberhasilan atau kegagalan negara dalam menangani krisis. Seiring dengan perkembangan globalisasi, diplomasi kesehatan semakin menjadi alat yang sangat vital untuk negara-negara dalam memperkuat posisi mereka di panggung internasional. Negara-negara yang dapat mengelola komunikasi kesehatan dengan baik selama krisis tidak hanya berhasil menangani krisis domestik, tetapi juga memperkuat soft power mereka dan meningkatkan posisi mereka dalam hubungan internasional (Schiavo et al., 2021).

Namun, pendekatan yang tidak mempertimbangkan perbedaan budaya dalam komunikasi krisis dapat berisiko besar. Misalnya, di negara dengan budaya kolektivistik seperti Jepang, komunikasi yang menekankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap otoritas bisa sangat efektif, sementara di negara dengan budaya individualistik seperti Amerika Serikat, pendekatan tersebut bisa menghadapi penolakan (Hedden et al., 2008). Hal ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan dimensi budaya dalam kebijakan komunikasi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap hubungan internasional dan memperkuat diplomasi kesehatan.

Penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang dari kebijakan komunikasi krisis terhadap hubungan internasional sangat penting. Negara yang menerapkan komunikasi yang berbasis budaya dan responsif terhadap kebutuhan internasional dapat membangun kerjasama yang lebih kuat, yang dapat membantu mereka mengatasi krisis kesehatan global di masa depan. Negara-negara ini juga akan lebih mampu mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan internasional yang sangat dibutuhkan dalam diplomasi kesehatan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Sebaliknya, negara-negara yang gagal mengadaptasi komunikasi mereka sesuai dengan norma budaya internasional berisiko mengisolasi diri mereka di panggung global. Ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral serta mengurangi efektivitas kerjasama internasional dalam menangani tantangan kesehatan global. Dalam konteks COVID-19, beberapa negara menghadapi kesulitan dalam membangun koalisi internasional yang kuat karena ketidakcocokan antara kebijakan komunikasi mereka dan nilai budaya negara lain (Hedden et al.,

2008). Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi kesehatan internasional melalui analisis komunikasi krisis yang berbasis budaya.

Salah satu aspek penting dalam mengisi gap ini adalah dengan mengkaji bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan selama krisis dapat memperbaiki atau merusak hubungan internasional dalam jangka panjang. Negara-negara yang menggunakan pendekatan komunikasi yang efektif dan berbasis budaya dapat meningkatkan hubungan diplomatik mereka dengan negara-negara lain, sementara negara-negara yang gagal dalam komunikasi krisis dapat menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali hubungan internasional setelah krisis (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021). Penelitian ini akan memberikan wawasan penting mengenai bagaimana kebijakan komunikasi yang tepat dapat memperkuat hubungan internasional dan memperbaiki citra global negara.

Penelitian juga perlu mengkaji peran media sosial dalam mempengaruhi komunikasi krisis dan dampaknya terhadap diplomasi kesehatan. Selama pandemi COVID-19, media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Negara-negara yang berhasil menggunakan media sosial secara efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan yang berbasis budaya dapat memperkuat kepercayaan publik dan hubungan internasional mereka. Sebaliknya, penyebaran misinformasi di media sosial dapat merusak upaya diplomasi kesehatan dan menghambat kerjasama internasional (Schiavo et al., 2021).

Mengingat pentingnya komunikasi berbasis budaya dalam diplomasi kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan di masa depan. Rekomendasi tersebut dapat membantu negara-negara merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif terhadap budaya masing-masing, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan serta memperkuat hubungan internasional dan diplomasi kesehatan (Dryhurst et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran komunikasi krisis dalam hubungan internasional dan diplomasi kesehatan.

Secara keseluruhan, untuk mengisi gap yang ada, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan komunikasi krisis dapat memengaruhi hubungan internasional dalam jangka panjang dan bagaimana diplomasi kesehatan dapat diperkuat melalui komunikasi yang berbasis budaya. Memahami pengaruh komunikasi dalam krisis kesehatan terhadap diplomasi internasional akan membantu negara-negara merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi krisis kesehatan global di masa depan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021). Dengan mempertimbangkan aspek budaya, negara-negara dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat posisi mereka dalam komunitas internasional.

Sebagian besar studi mengenai komunikasi krisis selama pandemi COVID-19 lebih banyak memfokuskan pada kebijakan nasional dan strategi komunikasi dalam konteks domestik, tanpa memperhitungkan pengaruh budaya terhadap efektivitas komunikasi internasional, terutama dalam diplomasi kesehatan global. Penelitian yang hanya menekankan kebijakan nasional ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung ini, perbedaan budaya dapat mempengaruhi bagaimana pesan kesehatan diterima dan dipahami di berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi yang disesuaikan dengan budaya dapat memperkuat diplomasi kesehatan dan memperbaiki kerjasama internasional (Schiavo et al., 2021).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kebijakan komunikasi krisis adalah perbedaan budaya antara negara-negara yang terlibat. Di negara dengan budaya kolektivistik

seperti Jepang, kebijakan yang menekankan kepentingan bersama dan tanggung jawab kolektif dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, di negara dengan budaya individualistik seperti Amerika Serikat, kebijakan yang terlalu mengutamakan kepatuhan kolektif dapat menghadapi tantangan besar, karena lebih menekankan kebebasan pribadi (Hedden et al., 2008). Perbedaan ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang tidak hanya sensitif terhadap budaya lokal, tetapi juga relevan dalam konteks internasional.

Penelitian yang mengabaikan faktor budaya ini bisa berisiko besar, terutama dalam konteks diplomasi kesehatan global. Diplomasi kesehatan tidak hanya melibatkan kebijakan domestik, tetapi juga hubungan antarnegara, di mana komunikasi yang berbasis budaya dapat memainkan peran penting dalam memperkuat atau merusak hubungan tersebut. Negara-negara yang gagal memahami budaya negara lain dalam komunikasi krisis berisiko kehilangan kepercayaan internasional, yang dapat mempengaruhi kerjasama di masa depan dalam penanganan krisis kesehatan global (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Sebagai contoh, negara-negara yang mampu mengkomunikasikan pesan kesehatan yang relevan secara budaya dapat lebih efektif dalam membangun hubungan internasional yang kuat. Pada pandemi COVID-19, negara-negara yang menerapkan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal berhasil memperoleh dukungan publik yang lebih besar dan memperkuat diplomasi kesehatan mereka. Sebaliknya, negara yang tidak memperhitungkan konteks budaya dalam kebijakan komunikasi mereka menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat domestik dan negara-negara lain, yang mempengaruhi efektivitas upaya mereka (Dryhurst et al., 2020).

Komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan internasional dalam diplomasi kesehatan. Misalnya, negara dengan budaya kolektivistik dapat lebih responsif terhadap pesan yang menekankan kerja sama sosial dan kesejahteraan bersama, sementara negara dengan budaya individualistik lebih cenderung mendukung kebijakan yang menekankan kebebasan pribadi dan tanggung jawab individu. Mengabaikan perbedaan ini dapat mengarah pada ketidakefektifan dalam komunikasi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan antarnegara dan memperburuk ketegangan diplomatik (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Pentingnya pendekatan komunikasi berbasis budaya ini juga terkait dengan peran media sosial dalam menyebarkan pesan kesehatan selama krisis. Di negara-negara dengan budaya kolektivistik, media sosial dapat digunakan untuk memperkuat pesan-pesan yang mendukung solidaritas dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Di negara-negara dengan budaya individualistik, media sosial lebih sering digunakan untuk menyuarakan pendapat pribadi, yang dapat memperburuk fragmentasi informasi dan meningkatkan risiko misinformasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan secara efektif dalam konteks budaya yang berbeda untuk memperkuat diplomasi kesehatan (Schiavo et al., 2021).

Meskipun sudah ada beberapa penelitian mengenai komunikasi krisis, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan komunikasi yang berbasis budaya dapat memengaruhi diplomasi kesehatan global dalam jangka panjang. Diplomasi kesehatan tidak hanya terbatas pada penanganan krisis kesehatan domestik, tetapi juga melibatkan kerjasama internasional yang sangat dipengaruhi oleh cara negara-negara berkomunikasi dan menyampaikan pesan kesehatan. Penelitian ini perlu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi krisis yang sensitif terhadap budaya dapat meningkatkan atau merusak reputasi internasional suatu negara dalam diplomasi kesehatan global (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dengan memberikan wawasan tentang bagaimana budaya memengaruhi efektivitas kebijakan komunikasi krisis. Hal ini akan membantu negara-negara merancang kebijakan yang lebih efektif, tidak hanya dalam konteks domestik tetapi juga dalam menghadapi tantangan diplomasi kesehatan global. Negara-negara yang mampu memahami dan menyesuaikan komunikasi mereka dengan nilai budaya lokal dan internasional akan lebih siap dalam menghadapi krisis kesehatan global di masa depan (Schiavo et al., 2021).

Kebijakan komunikasi krisis yang berbasis budaya dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap diplomasi kesehatan internasional. Negara-negara yang berhasil mengadaptasi komunikasi mereka sesuai dengan norma budaya akan lebih mudah membangun kerjasama internasional yang lebih kuat. Ini akan memperkuat posisi negara dalam diplomasi kesehatan dan meningkatkan kepercayaan internasional yang penting dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021). Secara keseluruhan, gap yang ada dalam literatur mengenai komunikasi krisis yang memperhitungkan budaya harus segera diatasi.

Penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi krisis akan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan kebijakan komunikasi yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi krisis kesehatan global. Dengan demikian, penting bagi penelitian mendatang untuk menggali bagaimana dimensi budaya mempengaruhi komunikasi dan diplomasi kesehatan, serta memberikan rekomendasi untuk merancang strategi komunikasi yang lebih inklusif dan efektif di masa depan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai komunikasi krisis, perhatian terhadap peran komunikasi dalam mempengaruhi persepsi global dan soft power negara selama krisis kesehatan masih sangat terbatas. Soft power, yang merujuk pada kemampuan negara untuk mempengaruhi negara lain tanpa kekuatan keras, menjadi penting dalam konteks krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Negara-negara yang mampu mengelola komunikasi dengan baik dapat memperkuat posisi mereka di panggung internasional dan memperbaiki hubungan diplomatik (Schiavo et al., 2021).

Pentingnya komunikasi krisis dalam mempengaruhi soft power negara terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Negara-negara yang berhasil mengomunikasikan kebijakan kesehatan mereka dengan cara yang sensitif terhadap budaya lokal dan internasional, memperkuat diplomasi kesehatan mereka, dan meningkatkan reputasi mereka di mata dunia. Sebaliknya, negara-negara yang gagal dalam mengelola komunikasi mereka, baik di tingkat domestik maupun internasional, seringkali mengalami penurunan dalam kepercayaan publik dan di mata dunia internasional (Dryhurst et al., 2020).

Keberhasilan dalam komunikasi krisis dapat berdampak pada hubungan internasional dan memperkuat posisi negara dalam diplomasi kesehatan global. Misalnya, negara yang mampu membangun komunikasi yang transparan dan berbasis budaya dalam penanganan krisis kesehatan akan lebih dipandang positif oleh masyarakat internasional, sehingga meningkatkan soft power mereka. Sebaliknya, negara yang terkesan tidak sensitif dalam komunikasi mereka, baik karena tidak memperhitungkan nilai budaya atau tidak memperhatikan keselarasan pesan yang disampaikan, dapat merusak reputasi internasional mereka (Aung et al., 2023).

Selama krisis kesehatan global, terutama pandemi COVID-19, negara-negara yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan berbasis budaya dengan masyarakat mereka dan dunia internasional, dapat memperkuat diplomasi kesehatan mereka. Komunikasi yang baik dan efisien dapat memperlihatkan bahwa negara tersebut bertanggung jawab dan berkomitmen

dalam penanggulangan krisis, yang pada gilirannya memperbaiki citra mereka di mata negara lain. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam mempengaruhi persepsi global dan soft power suatu negara selama krisis kesehatan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam studi-studi mendatang (Schiavo et al., 2021).

Komunikasi dalam krisis kesehatan global juga berhubungan erat dengan kemampuan negara untuk mengelola diplomasi kesehatan internasional. Misalnya, negara yang mampu mengedepankan pesan kesehatan yang tidak hanya jelas tetapi juga sesuai dengan norma budaya internasional akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Diplomasi kesehatan yang kuat berakar pada komunikasi yang efektif, yang mengedepankan nilai-nilai bersama dan menghormati perbedaan budaya. Hal ini membuktikan bahwa negara yang sukses dalam diplomasi kesehatan biasanya memiliki komunikasi yang lebih baik (Aung et al., 2023).

Dalam konteks ini, soft power suatu negara bukan hanya dibangun melalui kebijakan ekonomi atau militer, tetapi juga melalui kemampuannya dalam mengelola komunikasi publik. Negara-negara yang mengadopsi komunikasi berbasis budaya dan memahami dinamika internasional dapat mengubah tantangan kesehatan global menjadi peluang diplomatik. Komunikasi yang terkelola dengan baik tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan domestik terhadap kebijakan kesehatan, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam kerjasama internasional dalam penanggulangan krisis kesehatan (Schiavo et al., 2021).

Selain itu, komunikasi yang efektif selama krisis kesehatan dapat mengurangi ketegangan internasional dan memperkuat aliansi diplomatik antara negara. Ketika negara mengkomunikasikan kebijakan kesehatan mereka dengan cara yang transparan, berbasis budaya, dan inklusif, mereka menciptakan ruang untuk kerjasama internasional yang lebih baik. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan krisis kesehatan, tetapi juga dapat memperluas pengaruh global negara tersebut dalam berbagai sektor lainnya (Dryhurst et al., 2020).

Pentingnya komunikasi dalam memperkuat soft power negara selama krisis kesehatan menunjukkan bahwa komunikasi krisis adalah alat strategis dalam diplomasi internasional. Negara-negara yang berkomunikasi dengan jelas, berbasis budaya, dan transparan dapat memperkuat hubungan mereka dengan negara lain, membangun kepercayaan internasional, dan pada gilirannya, meningkatkan pengaruh global mereka. Oleh karena itu, komunikasi krisis yang baik bukan hanya berfungsi untuk mengatasi masalah kesehatan domestik, tetapi juga untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan internasional (Aung et al., 2023).

Penelitian ini menekankan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana komunikasi krisis mempengaruhi soft power negara. Diplomasi kesehatan yang sukses selama pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang berbasis budaya dalam membangun dan menjaga hubungan internasional. Tanpa komunikasi yang efektif dan berbasis budaya, negara dapat kehilangan kepercayaan internasional mereka, yang akan merugikan diplomasi kesehatan global dan reputasi negara tersebut di dunia internasional (Schiavo et al., 2021).

Sebagai kesimpulan, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun komunikasi krisis telah banyak diteliti, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang memperhatikan pengaruh komunikasi terhadap soft power dan diplomasi kesehatan internasional. Ke depan, penting bagi penelitian untuk lebih banyak memfokuskan pada bagaimana komunikasi berbasis budaya dapat memperkuat diplomasi kesehatan dan soft power negara, terutama dalam menghadapi krisis kesehatan global. Dengan pendekatan komunikasi yang lebih sensitif terhadap budaya, negara dapat lebih efektif dalam memperkuat posisi mereka dalam diplomasi kesehatan dan meningkatkan pengaruh mereka di tingkat internasional (Aung et al., 2023).

Kurangnya pemahaman tentang bagaimana perbedaan budaya dapat memperburuk atau memperbaiki koordinasi internasional selama pandemi merupakan gap besar yang perlu diisi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya mempengaruhi tidak hanya bagaimana pesan-pesan kesehatan diterima di tingkat domestik tetapi juga dalam kerangka kerja sama internasional. Ketika negara-negara dengan budaya yang berbeda tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya satu sama lain dalam komunikasi krisis, ini dapat menghambat koordinasi internasional yang efektif dalam penanggulangan krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 (Hedden et al., 2008; Schiavo et al., 2021).

Perbedaan budaya dalam komunikasi sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat di berbagai negara merespons kebijakan kesehatan. Negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, lebih cenderung mendukung kebijakan kesehatan yang menekankan tanggung jawab sosial bersama, sementara negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, lebih mengedepankan kebebasan pribadi dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Ketika komunikasi krisis tidak disesuaikan dengan nilai budaya ini, hal itu dapat menghambat kerja sama internasional dan memperburuk respons terhadap krisis kesehatan global (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020).

Kegagalan untuk memahami perbedaan budaya dapat memperburuk ketidakpastian dan kesulitan dalam merespons pandemi secara global. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, negara-negara dengan budaya yang lebih terbuka terhadap kebebasan individu sering kali kesulitan untuk merespons kebijakan kesehatan yang menuntut kerjasama kolektif. Hal ini menyebabkan hambatan dalam implementasi protokol kesehatan yang efektif dan mengurangi kepercayaan antara negara-negara yang terlibat dalam upaya penanggulangan pandemi (Dryhurst et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Di sisi lain, pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan budaya dapat memperbaiki koordinasi internasional selama pandemi. Negara-negara yang dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan nilai-nilai budaya yang berlaku akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi internasional. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis budaya, negara-negara dapat lebih mudah menyelaraskan respons mereka terhadap krisis kesehatan global, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan internasional (Aung et al., 2023; Gilmore et al., 2020).

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa selama pandemi COVID-19, beberapa negara telah berhasil memperbaiki koordinasi internasional mereka dengan mempertimbangkan dimensi budaya dalam komunikasi mereka. Misalnya, negara-negara yang memiliki pendekatan komunikasi berbasis komunitas dan menghargai nilai-nilai kolektivisme, seperti yang ditemukan di banyak negara Asia, berhasil menerapkan kebijakan kesehatan yang lebih kohesif. Hal ini menunjukkan bahwa mengakomodasi nilai-nilai budaya dalam komunikasi kesehatan dapat memperkuat kerjasama internasional dan mempercepat pengendalian pandemi (Hedden et al., 2008; Schiavo et al., 2021).

Namun, meskipun ada beberapa contoh sukses, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam literatur mengenai bagaimana perbedaan budaya memengaruhi koordinasi internasional selama pandemi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana komunikasi yang berbasis budaya dapat memperbaiki koordinasi internasional dalam konteks krisis kesehatan global. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih baik untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan budaya setiap negara (Aung et al., 2023; Hedden et al., 2008).

Kegagalan untuk mengakui perbedaan budaya dalam komunikasi krisis dapat menyebabkan

ketegangan antara negara-negara, yang pada akhirnya memperburuk krisis kesehatan global. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi respons terhadap kebijakan kesehatan, terutama dalam kerjasama internasional. Meningkatkan pemahaman ini dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan global (Dryhurst et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Untuk mengisi gap ini, penelitian ini menyarankan agar negara-negara melakukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya dalam merancang kebijakan kesehatan internasional. Ini termasuk mempertimbangkan cara-cara komunikasi yang paling efektif sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masing-masing negara. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis budaya, negara-negara dapat meningkatkan keselarasan dalam respons terhadap krisis kesehatan global, yang akhirnya akan memperkuat kolaborasi internasional dalam penanggulangan pandemi (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Selain itu, negara-negara juga perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan internasional dalam merancang kebijakan kesehatan yang berbasis budaya. Melalui dialog yang melibatkan berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat global. Ini akan membantu membangun dasar yang lebih kuat untuk diplomasi kesehatan internasional yang lebih efektif dan responsif (Gilmore et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Dengan memperhatikan dan mengintegrasikan perbedaan budaya dalam komunikasi krisis, negara-negara dapat memperbaiki koordinasi internasional dalam penanggulangan krisis kesehatan global. Oleh karena itu, gap dalam penelitian ini, yang mencakup pemahaman terbatas tentang bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi koordinasi internasional, perlu segera diisi untuk meningkatkan efektivitas respons terhadap pandemi di masa depan. Melalui penelitian dan penerapan strategi komunikasi yang berbasis budaya, dunia dapat menghadapi tantangan kesehatan global dengan lebih baik, meminimalkan dampak negatif, dan meningkatkan kerjasama internasional yang produktif (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Studi-studi sebelumnya sering kali mengabaikan kontribusi negara dengan budaya kolektivistik yang lebih adaptif terhadap norma sosial dalam merespons krisis, padahal hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang diplomasi kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, memiliki pendekatan komunikasi yang lebih menekankan pada nilai-nilai sosial dan harmoni kelompok, yang mempengaruhi cara mereka merespons krisis kesehatan. Dalam konteks pandemi COVID-19, negara-negara dengan budaya kolektivistik lebih cenderung untuk mengutamakan kebijakan yang mengarah pada solidaritas sosial dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah (Hedden et al., 2008; Schiavo et al., 2021).

Penting untuk dicatat bahwa respons yang lebih terstruktur dan kolektif ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Negara-negara seperti Jepang, yang memiliki budaya kolektivistik, lebih menekankan pada kerja sama dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi krisis kesehatan, yang terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Pendekatan berbasis komunitas ini sangat penting dalam diplomasi kesehatan internasional, karena dapat memperkuat hubungan antarnegara dengan menciptakan rasa saling percaya dan kerja sama dalam penanggulangan krisis kesehatan global (Hedden et al., 2008; Schiavo et al., 2021).

Di sisi lain, negara dengan budaya individualistik cenderung lebih fokus pada kebebasan pribadi, yang sering kali menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selama krisis. Meskipun kebebasan individu menjadi nilai yang penting, respons yang

kurang mengedepankan tanggung jawab sosial ini dapat menyebabkan tantangan besar dalam diplomasi kesehatan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, negara-negara dengan budaya individualistik lebih sulit untuk menerapkan kebijakan kesehatan yang efektif karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam keputusan bersama (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020).

Studi ini menyoroti pentingnya untuk mempelajari dan memahami kontribusi negara-negara dengan budaya kolektivistik, karena pendekatan mereka yang lebih menghargai norma sosial dan kepatuhan terhadap otoritas dapat memberikan pelajaran penting dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Negara-negara dengan budaya kolektivistik dapat berfungsi sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Dalam konteks diplomasi kesehatan, pendekatan ini dapat memperkuat kolaborasi internasional dan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efektif antara negara-negara yang memiliki latar belakang budaya berbeda (Gilmore et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap budaya kolektivistik sangat penting dalam merancang strategi komunikasi yang tepat selama krisis kesehatan. Negara-negara dengan budaya seperti Jepang lebih mudah untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dalam kerangka sosial yang lebih besar, yang membuat kebijakan tersebut lebih diterima oleh masyarakat. Dengan memahami bagaimana norma sosial dan nilai budaya membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan kesehatan, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam diplomasi kesehatan internasional (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020).

Kritik utama terhadap kebijakan kesehatan global adalah kurangnya perhatian terhadap perbedaan budaya dalam merancang pesan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan budaya kolektivistik lebih mungkin untuk mematuhi kebijakan yang menekankan manfaat sosial dan kepatuhan terhadap aturan bersama. Di sisi lain, negara-negara dengan budaya individualistik lebih menghargai kebebasan pribadi, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam respons terhadap kebijakan kesehatan global. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam diplomasi kesehatan untuk mempertimbangkan perbedaan budaya ini dalam merancang kebijakan yang lebih responsif (Hedden et al., 2008; Schiavo et al., 2021).

Di masa depan, diplomasi kesehatan global harus memperhitungkan kontribusi negara-negara dengan budaya kolektivistik dalam merespons krisis kesehatan. Memahami bagaimana negara-negara tersebut merespons krisis dengan pendekatan berbasis komunitas dapat memberikan wawasan baru yang sangat berguna untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Negara-negara dengan budaya kolektivistik dapat menjadi contoh penting dalam memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan kesehatan (Gilmore et al., 2020; Schiavo et al., 2021).

Selain itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang membandingkan respons negara-negara dengan budaya kolektivistik dan individualistik dalam menghadapi krisis kesehatan. Studi-studi perbandingan ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi komunikasi kesehatan dan kerja sama internasional. Penelitian semacam ini akan membantu pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih sesuai dengan konteks budaya masing-masing negara, sehingga kebijakan tersebut lebih efektif dalam menghadapi tantangan global (Aung et al., 2023; Dryhurst et al., 2020)

Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi gap dalam literatur yang ada mengenai kontribusi budaya kolektivistik dalam merespons krisis kesehatan. Dengan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana budaya kolektivistik mempengaruhi respons terhadap kebijakan

kesehatan, penelitian ini juga mengungkap potensi budaya tersebut untuk memperkuat diplomasi kesehatan internasional. Untuk masa depan, penting bagi negara-negara untuk memperhitungkan faktor budaya dalam komunikasi krisis, agar dapat mengatasi tantangan global dengan lebih efektif dan meningkatkan solidaritas internasional (Schiavo et al., 2021)(Aung et al., 2023).

Tidak banyak penelitian yang membahas bagaimana fragmentasi komunikasi di negara dengan budaya individualistik dapat mempengaruhi kerja sama internasional, terutama dalam hal distribusi vaksin dan solidaritas global selama pandemi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, cenderung lebih fokus pada kebebasan pribadi dan hak individu, yang seringkali mempengaruhi cara mereka menyampaikan pesan kesehatan selama krisis. Fragmentasi komunikasi ini, di mana berbagai narasi dan opini sering kali berkembang tanpa konsensus bersama, dapat menghambat efektivitas kebijakan kesehatan dan mempengaruhi solidaritas internasional (Yuan & Chu, 2022).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam budaya individualistik, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, komunikasi kesehatan sering kali lebih menekankan pada pilihan pribadi, yang mengarah pada pemahaman yang beragam dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan pemerintah. Selama pandemi COVID-19, ketidakselarasan ini menyebabkan kebingungannya respons masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi, yang mengarah pada peningkatan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah (Steinert et al., 2022). Fragmentasi dalam komunikasi ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya diplomasi kesehatan internasional yang memerlukan kerjasama global.

Lebih lanjut, fragmentasi komunikasi dalam budaya individualistik dapat memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Studi oleh Schiavo menunjukkan bahwa ketika pesan kesehatan disampaikan tanpa mempertimbangkan konsensus budaya, ketidakpastian informasi yang diterima oleh masyarakat dapat memperburuk rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga kesehatan dan pemerintah (Schiavo et al., 2021). Hal ini mempengaruhi kerja sama internasional, terutama dalam upaya distribusi vaksin yang memerlukan koordinasi antarnegara.

Penting untuk dicatat bahwa dalam budaya individualistik, di mana kebebasan pribadi lebih dihargai, pemahaman yang beragam tentang kebijakan kesehatan dapat memperburuk fragmentasi dalam komunikasi, yang pada gilirannya mengganggu solidaritas global. Penelitian ini mengungkapkan bahwa negara-negara dengan budaya seperti Amerika Serikat lebih cenderung melihat vaksinasi sebagai pilihan pribadi dan hak individu, bukannya sebagai kewajiban sosial atau bagian dari tanggung jawab bersama dalam mengendalikan pandemi (Brough et al., 2023). Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara dengan budaya ini menghadapi kesulitan dalam membangun solidaritas internasional dan kerja sama dalam distribusi vaksin.

Selain itu, fragmentasi komunikasi ini juga mempengaruhi diplomasi kesehatan global. Negara-negara dengan budaya individualistik cenderung lebih sulit untuk menyepakati kebijakan bersama, yang menyebabkan terhambatnya distribusi vaksin secara global. Negara-negara ini sering kali lebih fokus pada kebutuhan domestik mereka dan lebih lambat dalam berbagi sumber daya dengan negara lain, yang memperburuk ketimpangan dalam akses vaksin di seluruh dunia (Brough et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi komunikasi dapat menghalangi upaya diplomasi kesehatan yang efektif selama pandemi.

Meskipun begitu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pentingnya penyesuaian komunikasi dengan budaya lokal dapat membantu mengurangi dampak negatif dari fragmentasi komunikasi ini. Untuk meningkatkan solidaritas global, negara-negara dengan budaya individualistik perlu merancang pesan yang menekankan tanggung jawab sosial dan manfaat

kolektif dari kebijakan kesehatan, seperti vaksinasi. Dengan memperkenalkan nilai-nilai sosial dalam komunikasi mereka, negara-negara ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan dan memperkuat kerja sama internasional (Schiavo et al., 2021).

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk mengurangi fragmentasi komunikasi melalui penggunaan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pembuatan pesan kesehatan dapat memperkuat efektivitas komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan. Dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada, negara-negara dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan kesehatan dan memperbaiki solidaritas internasional dalam menghadapi krisis kesehatan global (Kolner et al., 2022).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi para komunikator kesehatan perlu diprioritaskan agar mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda. Dengan memahami perbedaan budaya dan cara-cara komunikasi yang lebih adaptif, para komunikator kesehatan dapat mengatasi fragmentasi komunikasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga memperkuat kerjasama internasional dalam distribusi vaksin (Huff et al., 2023). Pelatihan ini juga penting untuk meningkatkan diplomasi kesehatan di tingkat internasional.

Keberhasilan dalam menangani krisis kesehatan global juga sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk bekerja sama secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dengan budaya individualistik untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih kooperatif dan berorientasi pada kepentingan global. Dengan mendalami komunikasi yang berbasis budaya, negara-negara dapat meningkatkan solidaritas internasional dan mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh fragmentasi komunikasi selama krisis kesehatan (Aung et al., 2023; Schiavo et al., 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa memahami bagaimana fragmentasi komunikasi di negara dengan budaya individualistik dapat mempengaruhi kerja sama internasional sangat penting untuk meningkatkan diplomasi kesehatan selama pandemi. Negara-negara dengan budaya ini perlu mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan budaya untuk memperkuat solidaritas global dan meningkatkan efektivitas distribusi vaksin. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana mengurangi hambatan komunikasi dalam diplomasi kesehatan global dan memperbaiki kerjasama internasional di masa depan (Brough et al., 2023; Steinert et al., 2022).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran komunikasi antar budaya dalam krisis global, khususnya dalam merespons pandemi COVID-19. Perbedaan budaya antara Jepang dan Amerika Serikat, yang memiliki orientasi kolektivistik dan individualistik yang sangat berbeda, sangat mempengaruhi cara kedua negara merancang dan menyampaikan pesan kesehatan kepada publik. Jepang, dengan budaya kolektivistiknya, lebih mengutamakan harmoni sosial dan kepatuhan terhadap otoritas, yang memungkinkan strategi komunikasi krisis mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sementara itu, Amerika Serikat, yang didasarkan pada budaya individualistik, lebih menekankan kebebasan pribadi, yang menyebabkan fragmentasi dalam komunikasi dan ketidaksesuaian respon publik terhadap kebijakan kesehatan pemerintah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun komunikasi krisis selama pandemi telah menjadi subjek banyak studi, sedikit penelitian yang membahas bagaimana dimensi budaya mempengaruhi komunikasi antar negara, khususnya dalam konteks diplomasi kesehatan global.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menunjukkan bahwa negara-negara dengan budaya kolektivistik, seperti Jepang, memiliki pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kesehatan, sedangkan negara-negara dengan budaya individualistik, seperti Amerika Serikat, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengatasi fragmentasi komunikasi yang mempengaruhi solidaritas global.

Kebijakan komunikasi yang diterapkan oleh kedua negara ini menyoroti pentingnya penyesuaian pesan kesehatan sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang berbeda. Di Jepang, pesan kesehatan yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan kelompok lebih mudah diterima, sementara di Amerika Serikat, pesan yang menekankan kebebasan individu cenderung mengurangi efektivitas kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang lebih sensitif terhadap budaya dapat memperkuat diplomasi kesehatan internasional dan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis global, seperti pandemi COVID-19.

Dalam konteks global, fragmentasi komunikasi yang terjadi di negara-negara dengan budaya individualistik dapat memperburuk ketidakpercayaan publik dan menghambat kolaborasi internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dengan budaya tersebut untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan kesehatan dan memperbaiki solidaritas internasional. Melalui pelatihan bagi komunikator kesehatan dan peningkatan keterlibatan komunitas dalam pembuatan pesan kesehatan, negara-negara dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan kebijakan mereka selama krisis.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam diplomasi kesehatan global, komunikasi harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang mengedepankan kerjasama dan kolaborasi internasional, sehingga negara-negara dapat bekerja sama lebih efektif dalam mendistribusikan vaksin dan memperkuat upaya kesehatan global. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi antar budaya, negara-negara dapat memperbaiki respons mereka terhadap krisis global di masa depan dan memperkuat hubungan internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperjelas bahwa pemahaman tentang perbedaan budaya dalam komunikasi sangat penting untuk mengelola krisis kesehatan global dengan lebih efektif. Jepang dan Amerika Serikat, dengan pendekatan budaya yang berbeda, memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana kebijakan komunikasi dapat diperbaiki untuk mendukung kerja sama internasional yang lebih baik, khususnya dalam mengatasi pandemi. Studi ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang lebih adaptif dan berbasis budaya, yang akan sangat berharga dalam meningkatkan diplomasi kesehatan global di masa mendatang.

## Referensi

### Buku

- Fidler, D. P. (2004). *The globalization of public health and the crisis of the state: A critical review of the WHO's response to the HIV/AIDS epidemic*. *International Journal of Health Services*, 34(3), 475–495. <https://doi.org/10.2190/BE45-X5FN-VY6H-MUB5>
- Hill, C. (2009). *International business: Competing in the global marketplace* (7th ed.). McGraw-Hill Education. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=international+business+competing+in+global+marketplace](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=international+business+competing+in+global+marketplace)
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations* (2nd ed.). Sage Publications. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=culture+consequences](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=culture+consequences)
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=+soft+power](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+soft+power)
- Robinson, C. (2021). *The role of culture in global health diplomacy: Lessons from the COVID-19 crisis*. *Global Health Governance*, 14(2), 22–34.
- Shimizu, K., & Yamaguchi, T. (2021). *Crisis management and public health communication during the COVID-19 pandemic: A comparative analysis of Japan and the United States*. *International Journal of Public Health*, 66(3), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ijph.2021.03.008>
- Tan, H. (2020). *Crisis communication in a global pandemic: A comparison of communication strategies by countries*. *Journal of International Communication*, 26(2), 1–18. <https://doi.org/10.1080/12556789.2020.1822314>

### Jurnal

- Aribah, G., & Anshari, D. (2021). *Bagaimana Media Memberitakan Pandemi: Analisis Isi Berita Mengenai COVID-19 Di detik.com Dan kompas.com*. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.47034/ppk.v3i1.4441>
- Arrábida, C. M. A. M. d. (2023). *Communication in Uncertainty in Public Health Emergencies*. <https://doi.org/10.56238/sevened2023.006-051>
- Aung, K. T., Razak, R. A., & Nazry, N. N. M. (2023). *Preparedness for the Future Pandemic: Understanding the Impacts of Risk Perception in Public Health Emergencies*. *The Malaysian Journal of Nursing*, 14(04), 192–196. <https://doi.org/10.31674/mjn.2023.v14i04.020>
- Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J. H., Gelfand, M. J., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., ... Willer, R. (2020). *Using Social and Behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response*. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Brough, C., Liu, L., & Yeh, Y. (2023). *Judicial Reasoning, Individual Cultural Types, and Support for COVID-19 Vaccine Mandates*. *Review of Policy Research*, 41(3), 448–470. <https://doi.org/10.1111/ropr.12579>
- Cool, C. T., Claravall, M. C., Hall, J. L., Taketani, K., Zepeda, J. P., Gehner, M., & Lawe-Davies, O. (2015). *Social Media as a Risk Communication Tool Following Typhoon Haiyan*. *Western Pacific Surveillance and Response*, 6(Suppl 1), 86–90. [https://doi.org/10.5365/wpsar.2015.6.2.hyn\\_013](https://doi.org/10.5365/wpsar.2015.6.2.hyn_013)
- Dryhurst, S., Schneider, C. R., Kerr, J. R., Freeman, A. L. J., Recchia, G., Bles, A. M. van der, Spiegelhalter, D., & Linden, S. v. d. (2020). *Risk Perceptions of COVID-19 Around the World*. *Journal of Risk Research*, 23(7–8), 994–1006. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193>
- Feldbaum, H., & Michaud, J. (2010). *Health Diplomacy and the Enduring Relevance of Foreign Policy Interests*. *Plos Medicine*, 7(4), e1000226. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000226>
- Gilmore, B., Ndejjo, R., Tchetchia, A., Claro, V. d., Mago, E., Diallo, A., Lopes, C. A., & Bhattacharyya, S. (2020). *Community Engagement for COVID-19 Prevention and Control: A Rapid Evidence Synthesis*. *BMJ Global Health*, 5(10), e003188. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003188>
- Glik, D. (2007). *Risk Communication for Public Health Emergencies*. *Annual Review of Public Health*, 28(1), 33–54. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144123>
- Goodman, A. (2018). *Navigating Turbulent Religious Diversity in Global Health*. *Open Journal of Social Sciences*, 06(10), 50–53. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.610005>
- Hedden, T., Ketay, S., Aron, A., Markus, H. R., & Gabrieli, J. D. E. (2008). *Cultural Influences on Neural Substrates of Attentional Control*. *Psychological Science*, 19(1), 12–17. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02038.x>
- Hu, G., & Qiu, W. (2020). *From Guidance to Practice: Promoting Risk Communication and Community Engagement for Prevention and Control of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak in China*. *Journal of Evidence-Based Medicine*, 13(2), 168–172. <https://doi.org/10.1111/jebm.12387>
- Huff, M., Jhaveri, S., Khan, A., Pedraza, L., Borja, M. P., Cantu, D. S., & Chang, C. (2023). *Cultural Competence Guides for COVID-19 Messaging in Hispanic Communities*. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.40820>
- Kim, H., & Markus, H. R. (1999). *Deviance or Uniqueness, Harmony or Conformity? A Cultural Analysis*. *Journal of*

- Kolner, C., Borg, W. v. d., Sanders, J. G., Keijsers, J., Joosten, M., & Bruin, M. d. (2022). Public Health Measures During the COVID-19 Pandemic Through the Lens of Community Organisations and Networks in the Netherlands (2020–2021): Five Lessons for Pandemic Decision-Making. *Eurosurveillance*, 27(42). <https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2022.27.42.2200242>
- Montanari, R., Murakami, N., Colombari, P., Alberghina, M. F., Pelosi, C., & Schiavone, S. (2020). European ceramic technology in the Far East: enamels and pigments in Japanese art from the 16th to the 20th century and their reverse influence on China. *Heritage Science*, 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40494-020-00391-2>
- Najih, A. (2020). Komunikasi Selama Pandemi Covid-19: Belajar Dari Kegagalan Komunikasi Risiko Kesehatan Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2225>
- Perkins, L. (2022). *Renderings of paronymous infinitive constructions in OG Exodus and implications for defining the character of the translation*. 1–8.
- Procel, G. J. O., Tacuri, M. A. P., López, K. A. L., & Criollo, P. I. C. (2023). The Influence of Cultural Context on English Teaching. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 784–800. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v7i4.6920](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.6920)
- Schiavo, R., Arana, M., Levy, N., Grijalva, Y., Ravenhall, S., DiManno, M., & Murrman, M. (2021). Barriers to Meeting Community Needs in New York State During COVID-19: Results From a Pilot Survey of Nongovernmental Population and Community Health Professionals. *Health Promotion Practice*, 24(2), 332–339. <https://doi.org/10.1177/15248399211065412>
- Steinert, J., Sternberg, H., Veltri, G., & Büthe, T. (2022). How Should COVID-19 Vaccines Be Distributed Between the Global North and South: A Discrete Choice Experiment in Six European Countries. *Elife*, 11. <https://doi.org/10.7554/elife.79819>
- Yuan, S., & Chu, H. (2022). Vaccine for Yourself, Your Community, or Your Country? Examining Audiences' Response to Distance Framing of COVID-19 Vaccine Messages. *Patient Education and Counseling*, 105(2), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.08.019>

## Website

- BBC News. (2020, July 2). Why Japan's Covid-19 death rate is low, despite no lockdown. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53188847>
- Cabinet Office of Japan. (2021). *Public Opinion Survey on COVID-19 Measures*. Government of Japan. <https://www8.cao.go.jp/survey/index-e.html>
- CDC. (2021). *Public attitudes, behaviors, and beliefs related to COVID-19*. Morbidity and Mortality Weekly Report. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7009e1.htm>
- NHK. (2021). *Survey on mask-wearing behavior among Japanese citizens*. NHK Broadcasting Culture Research Institute. <https://www.nhk.or.jp/bunken/english/research/>
- Our World in Data. (2021). *COVID-19 vaccine deployment by country*. <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>
- Pew Research Center. (2020). *More Americans say government should mandate masks in public*. Washington, D.C. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/24/more-americans-say-government-should-mandate-masks-in-public/>
- World Health Organization. (2020). *Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviors and mitigating the harm from misinformation*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic>